**PENERAPAN PRINSIP KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM
PRAKTEK JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK PUSPA
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
Nurul Laili Hilalia
NIM : 204105020157

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**PENERAPAN PRINSIP KEJUJURAN DAN KeadILAN DALAM
PRAKTEK JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK PUSPA
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
Program Studi Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Oleh:

Nurul Laili Hilalia
NIM : 204105020157

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
DESEMBER 2025**

**PENERAPAN PRINSIP KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM
PRAKTEK JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK PUSPA
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Syariah
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

Nurul Laili Hilalia

NIM : 204105020157

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing:

AYYU AININ MUSTAFIDAH, S.H.I., M.E
NIP. 199107152019032013

**PENERAPAN PRINSIP KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM
PRAKTEK JUAL BELI OBAT GENERIK DI APOTEK PUSPA
KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN JEMBER
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Ana Pratiwi, M.S.A
NIP. 198809232019032003

Sekretaris

Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, M.AK
NIP. 199406302022032005

Anggota :

1. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
2. Ayyu Ainin Mustafidah, M.E

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Ubaidillah, M.Ag
NIP. 1968 2261996031001

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ

Artinya: “Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.” (QS. Al-An’am [6]:152*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al-Qur’an QS. Al-An’am [6]:152

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Muhammad SAW, semoga Skripsi Ini dapat Ridho di sisi-Nya, dan sebagai tanda terimakasih, saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Horsan, Mama Hanisa (Almarhum), dan Ummi Sintia, yang tidak henti-hentinya mendoakan, mendukung, serta memberikan cinta kasih yang tiada terhingga.
2. Saudara-saudaraku tercinta, Abang Albab, Abang Hikam, Adek Silmi, dan Adek Adib, yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan, serta semangat.
3. Mbak Yusi, Mbak Merly beserta keluarga yang dengan penuh kasih telah merawat, mendukung, dan membantu saya selama berada di Jember.
4. Ponakan sepupu saya tersayang, Cepping Iim, yang selalu membawa keceriaan dan menjadi penyemangat.
5. Seluruh Guru Sekolah mulai TK, SD sampai SMA, Guru Mengaji, Guru Madrasah hingga para Dosen UIN KHAS Jember, yang telah membimbing dan memberikan Ilmu bermanfaat.
6. Untuk Sahabat-sahabat saya di bangku kuliah: Ilman Nafi'ah, Mega Ayu Putri, Riskiyani, Arifatus Sholeha dan Intan Paramita, yang telah menjadi sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
7. Teman dekat saya di KKN kelompok 24: Widatur Rohmah dan Erika Tri Juraida, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan keceriaan.

8. Sahabat kecil saya Anis Sulala, yang selalu bersama sejak kecil, di bangku SD sampai SMA, dan selalu memberikan semangat dan dukungan.
9. Sahabat SMA saya Firmansyah, yang senantiasa memberikan semangat, dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
10. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang tercinta, terima kasih telah memberikan kesempatan belajar selama ini. Semoga para lulusannya selalu bisa membawa ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, amin ya robbal alamin.
11. Rekan-rekan kelas Ekonomi Syariah 4 serta seluruh kelas Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang selalu saling mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan tugas akhir.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa Alam Semesta. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Atas nikmat dan anugerah-Nya, sehingga dapat terselesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Prinsip Kejujuran dan Keadilam dalam Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Etika Bisnis Islam.” Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari banyak pihak, karena hal tersebut peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Prof. Dr. Drs. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
4. Dr. Sofiah, M.E selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).

6. Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I., M.E. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberikan bimbingan pada peneliti dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang sudah memberikan ilmu kepada peneliti sehingga bisa mengetahui apa yang belum diketahui sebelumnya.

Peneliti menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentu masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kemudian dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi penulis serta pembacanya.

Jember, 04 Oktober 2025

Peneliti
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Nurul Laili Hilalia
204105020157

ABSTRAK

Nurul Laili Hilalia, Ayyu Ainin Mustafidah. 2025: *Penerapan Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember Persepektif Etika Bisnis Islam.*

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Obat Generik, Harga Eceran Tertinggi (HET), Keadilan, Kejujuran.

Sektor kesehatan adalah bidang yang sangat penting dan membutuhkan keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial, terutama dalam hal penjualan obat generik. Dalam Islam, setiap aktivitas bisnis harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Di Kecamatan Kaliwates terdapat banyak apotek, sehingga memiliki potensi untuk munculnya praktik bisnis yang tidak etis, seperti persaingan harga yang tidak sehat dan ketidaktransparangan informasi.

Fokus Penelitian adalah 1) Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates? 2) Bagaimana penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam penetapan harga obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa di Kecamatan Kaliwates Jember. 2) Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam penetapan harga obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan observasi guna mengevaluasi penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik penjualan obat generik di Apotek Puspa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek Puspa telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam praktek penjualan dan pelayanan obat generik. Transaksi dilakukan secara sah, sukarela, dan terbuka dengan memberikan informasi mengenai obat, harga, aturan penggunaan obat, serta menyediakan struk pembelian. Karyawan juga memberikan edukasi dan alternatif obat saat harga obat melebihi kemampuan beli konsumen. Penetapan harga obat generik dilakukan sesuai atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan margin keuntungan yang wajar. Temuan ini menunjukkan bahwa apotek mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, pelayanan yang baik, serta keadilan, sehingga tidak hanya memprioritaskan laba, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan perlindungan konsumen sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Lokasi Penelitian	49

	C. Subyek Penelitian	51
	D. Teknik Pengumpulan Data	53
	E. Analisis Data.....	56
	F. Keabsahan Data.....	58
	G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
	A. Objek Penelitian	61
	B. Penyajian Data dan Analisis	64
	C. Pembahasan Temuan	94
BAB V	PENUTUP.....	132
	A. Kesimpulan.....	132
	B. Saran-saran	133
	DAFTAR PUSTAKA	134
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 1.1 Jumlah Apotek Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu	21
Tabel 4.1 Daftar Harga Obat Generik Di Apotek Puspa.....	82
Tabel 4.2 Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Harga HET Obat Generik.....	114
Tabel 4.3 Perbandingan Harga Obat Generik di Apotek Puspa dengan HET	116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam menekankan pentingnya pemahaman terhadap dasar-dasar serta syarat-syarat dalam berbisnis sesuai dengan hukum Islam. Setiap kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai moralitas, akhlak, dan keadilan. Dalam ajaran Islam, hubungan antara moralitas dan aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan karena seluruh aktivitas bisnis diatur oleh norma-norma etika yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berusaha dan mengembangkan kekayaannya, selama dilakukan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, etika bisnis Islam memiliki peran penting dalam mengarahkan kegiatan ekonomi agar tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.¹

Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.² Etika bisnis Islam adalah sekumpulan nilai yang menjelaskan apa yang baik, buruk, benar, dan salah dalam berbisnis. Dengan demikian, etika bisnis Islam dapat dipahami sebagai seperangkat nilai yang menjelaskan batasan perilaku yang baik dan

¹ Fauzan, et al., *Etika Bisnis dan Profesi*, (Jakarta: Indigo Media, 2023), 24, <http://digilib.uinkhas.ac.id/27569/1/Etika%20Bisnis%20%26%20Profesi%20-%20standar%20-%20Oke.pdf>.

² Dikdik Harjadi, Dewi Fatmasari, 2015, *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep*, (Kuningan: UNIKU Press, 2024), 8, <https://share.google/JSPyoS3tP8g08kTEp>.

buruk, benar dan salah dalam kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Etika ini mengarahkan pelaku usaha agar bertindak secara adil, wajar, dan jujur dalam setiap transaksi, sehingga tujuan bisnis dapat tercapai tanpa melanggar ketentuan agama.³

Etika bisnis islam berfungsi sebagai landasan dalam bertindak, berperilaku sehingga menjadi watak dan kebiasaan dalam berbisnis.⁴ Prinsip etika yang disadari dalam bisnis Islam, yaitu Jujur dalam takaran (*Quantity*), menjual barang yang baik mutunya (*Quality*), dilarang menggunakan sumpah, ramah serta bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, menetapkan harga dengan transparan.⁵ Secara umum, prinsip etika bisnis Islam meliputi kesatuan, keseimbangan, kebebasan memilih, tanggung jawab, serta kebenaran yang tercermin dalam keadilan dan kejujuran. Prinsip keseimbangan atau keadilan menuntut pelaku usaha untuk bersikap adil terhadap seluruh pihak tanpa diskriminasi, sehingga kegiatan bisnis tetap berada dalam koridor moral dan syariah. Berikut merupakan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wirausaha syariah yang terdapat di surat An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَأْمَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ ءِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا ءَأَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ءَالَهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

³ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 1, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU%20ETIKA%20BISNIS%20ISLAM%20ANRAS%20neww.pdf>.

⁴ Thuba Jazil, dan Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 41, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

⁵ Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, 16-17.

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,” (QS An Nisa: 29).⁶

Etika bisnis berperan sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ilmu pengetahuan dan agama. Etika ini menetapkan prinsip, norma, serta standar dalam perilaku untuk membedakan antara tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Dalam proses transaksi jual beli, para pelaku usaha tetap terikat oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam menentukan harga, yang tidak sepenuhnya berada sepenuhnya di tangan pengusaha sendiri.⁷ Etika bisnis juga mencakup seluruh aspek usaha seperti produksi, manajemen, keuangan, dan pemasaran serta penting dalam membentuk perusahaan yang kuat, kompetitif, dan bernilai tinggi. Dalam Islam, etika bisnis melarang unsur ketidakjelasan (*jahal*), perjudian (*maisir*), riba, bahaya (*dharar*), penipuan (*gharar*), penyalahgunaan hak, monopoli, dan penindasan.⁸ Etika bisnis Islam berperan penting dalam perkembangan perusahaan dan peningkatan pendapatan UMKM, mencakup lima aspek utama: tauhid, keseimbangan, tanggung jawab, kehendak bebas, serta kebajikan seperti kejujuran tanpa tipu muslihat

⁶ Al-Qur'an QS. An-nisa [4]:29

⁷ Diah Armi Rosidah, “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun,” (Skripsi, IAIN Ponogoro, 2021), 2-3,
[https://etheses.iainponogoro.ac.id/18394/1/Skripsi%20DIAH%20ARMIN%20ROSIDAH_210216_039_Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20\(ethesis\).pdf](https://etheses.iainponogoro.ac.id/18394/1/Skripsi%20DIAH%20ARMIN%20ROSIDAH_210216_039_Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20(ethesis).pdf).

⁸ Siti Nurul Huda, Nandang Ihwanuddin, “Etika Bisnis dalam Tinjauan Al-Qu’an dan Hadits,” *journal of Islamic studies review*, 02 no.1 (Universitas Islam Bandung, 2022): 67-70,
<https://share.google/rbIk3D4kcsbTL28WX>.

(Khalishah Ulfah & Muryani Arsal, 2022).⁹ sebagaimana ditegaskan dalam hadist: “*Tidaklah berjualan (berniaga) di pasar kami kecuali dia telah paham (mendalami) agamanya (transaksi).*” (Atsar Riwayat At-Tirmidzi).¹⁰

Penerapan etika bisnis Islam menjadi sangat penting pada sektor usaha yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, salah satunya adalah sektor kesehatan. Praktik jual beli obat generik merupakan bagian penting dalam pelayanan kefarmasian karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Apotek tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tanggung jawab moral kepada konsumen. Oleh karena itu, praktik jual beli obat generik di apotek perlu memperhatikan prinsip keadilan dan kejujuran agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.

Obat generik merupakan obat yang menggunakan nama zat aktif sesuai dengan Farmakope Indonesia dan dapat diproduksi setelah masa paten obat berakhir. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010, obat generik terdiri atas obat generik berlogo dan obat generik bermerek dagang.¹¹ Berbeda dengan obat paten yang dilindungi hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, obat generik dapat diproduksi oleh berbagai produsen

⁹ Adek Safitri Nasution, M. Yarham, “Peran Penting Etika Bisnis Terhadap Pendapatan dan Pengembangan UMKM,” *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (Medan: Universitas Syehk Ali Hasan Ahmad, 2023): 46, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/welfare/article/download/16339/7061>.

¹⁰ Thuba Jazil, dan Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 16, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

¹¹ Rosidah, “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun,” 46.

sehingga harganya relatif lebih terjangkau.¹² Pemerintah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendorong penggunaan obat generik untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan menekan biaya pengobatan masyarakat.¹³ Perbedaan utama antara obat generik dan obat paten terletak pada aspek harga, sementara kandungan zat aktif dan khasiatnya relatif setara.

Pemerintah Indonesia melalui Permenkes No. 98 Tahun 2015 menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) obat untuk menjamin transparansi dan keterjangkauan harga bagi masyarakat. HET berlaku di apotek, toko obat, serta instalasi farmasi rumah sakit atau klinik. Untuk obat generik, HET mengacu pada *e-catalog*, sementara obat non-generik ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28% dari harga *netto* apotek.¹⁴ Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya perbedaan harga jual obat generik di tingkat apotek. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, terdapat variasi harga obat generik serta perbedaan dalam penyampaian informasi harga kepada konsumen.¹⁵ Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan etika. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi

¹² Laili Nur Cholidah, "Pengetahuan, Sikap dan Persepsi Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terhadap Obat Generik dengan Metode Systematic Literature Review." (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 16, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64234/1/Laili%20Nur%20Cholidah%20-%20FIKES.pdf>.

¹³ Cholidah, "Pengetahuan, Sikap dan Persepsi Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terhadap Obat Generik dengan Metode Systematic Literature Review," 1.

¹⁴ Fidela Febri Arisanti, "Analisis Minimalisasi Biaya Harga Obat Antidiabetes di Beberapa Apotek Kabupaten Malang (Studi dilakukan terhadap Obat Glibenklamid dan Metformin)," (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021), 19-20, [https://repository.ub.ac.id/183890/1/-%20Fidela%20Febri%20Arisanti%20\(1\).pdf](https://repository.ub.ac.id/183890/1/-%20Fidela%20Febri%20Arisanti%20(1).pdf).

¹⁵ Observasi di Apotek Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 11 November 2024.

ketidaksesuaian antara ketentuan harga yang berlaku dengan prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana diajarkan dalam etika bisnis Islam dalam berbisnis.¹⁶ Kondisi tersebut berkaitan langsung dengan prinsip kejujuran dalam penyampaian informasi harga serta prinsip keadilan dalam penetapan harga obat generik bagi konsumen.

Kecamatan Kaliwates merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Jember dan menjadi pusat aktivitas ekonomi serta pelayanan masyarakat.¹⁷ Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk apotek. Kecamatan Kaliwates juga dikenal memiliki jumlah apotek yang lebih banyak dibandingkan kecamatan lain, sehingga persaingan usaha menjadi cukup ketat. Situasi ini berpotensi memunculkan praktik bisnis yang kurang etis, seperti ketidaktransparanan informasi harga kepada konsumen, apabila tidak diimbangi dengan penerapan etika bisnis yang baik.

Tabel 1.1
Jumlah Apotek Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember

No	Desa	Jumlah Apotek
1	Mangli	2
2	Sampusari	4
3	Kaliwates	36
4	Tegal Besar	-
5	Jember Kidul	-
6	Kepatihan	-
7	Kebon Agung	-
Jumlah		42

Sumber: <https://jemberkab.bps.go.id/>, 2024.

¹⁶ Nur Fatoni, 2014, "Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam," (Bandung: Pustaka Setia), 168.

¹⁷ P2K STEKOM. "Kaliwates, Jember," Semarang jawa tengah, 2023, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kaliwates, Jember](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kaliwates,_Jember). 25 Mei 2024. Pukul 21:26 WIB.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji etika bisnis Islam dalam bidang kefarmasian, namun masih memiliki keterbatasan dari sisi objek, lokasi, maupun fokus kajian. Penelitian oleh Diah Armin Rosidah (2021) meneliti praktik jual beli obat generik di wilayah yang memiliki karakteristik pasar berbeda. Penelitian lain oleh Tiara Fadillah dkk. (2023) lebih menitikberatkan pada penjualan obat sirup anak, sementara penelitian Anisyah (2023) fokus pada aspek hukum ekonomi syariah terkait obat daftar G. Dengan demikian, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli serta penetapan harga obat generik di wilayah pusat kota dengan tingkat persaingan apotek yang tinggi seperti Kecamatan Kaliwates.

Apotek Puspa dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah beroperasi lebih dari lima belas tahun dan memiliki izin resmi, sehingga praktik pelayanannya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Apotek Puspa memiliki lokasi yang strategis serta menyediakan berbagai jenis obat generik dengan variasi merek dan harga.¹⁸ Kondisi tersebut menjadikan Apotek Puspa relevan untuk diteliti dalam konteks penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli obat generik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli serta penetapan harga obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan perspektif etika bisnis Islam. Oleh

¹⁸ Observasi di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 30 Agustus 2025.

karena itu, peneliti mengambil judul skripsi **“Penerapan Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Etika Bisnis Islam”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates?
2. Bagaimana penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penetapan harga obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa di Kecamatan Kaliwates Jember.
2. untuk mengetahui penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penetapan harga obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates menurut etika bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

1. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan untuk masyarakat dalam pemahaman terhadap etika bisnis islam dalam menentukan harga jual obat generik di apotek. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi sebagai sumber bacaan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat bagi Peneliti

Adapun manfaat bagi penulis secara pribadi yakni, mampu memahami serta dapat memberikan wawasan yang luas dan pengalaman baru dan menambah pengetahuan penulis tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa. Selain itu, penelitian ini dapat memberi masukan bagi regulator untuk mengembangkan pedoman atau standar etika bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam dalam bidang farmasi.

E. Definisi Istilah

1. Etika Bisnis Islam adalah seperangkat pedoman moral dalam menjalankan aktivitas usaha yang menekankan pentingnya pemisahan antara yang halal dan haram. Prinsip ini mengarahkan umat Islam agar berperilaku sesuai dengan ketentuan syariat dalam setiap kegiatan ekonomi. Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan utama dalam membentuk karakter serta etika pelaku usaha dalam Islam.¹⁹ Adapun nilai-nilai ekonomi dalam Islam mencakup empat prinsip utama, yaitu tauhid (kesatuan), keadilan dan keseimbangan, kebebasan berkehendak, serta tanggung jawab moral dan sosial.²⁰
2. Praktek jual beli dalam etika bisnis islam adalah transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukun tertentu agar sah secara syariat. Menurut mayoritas ulama, rukun jual beli mencakup beberapa hal, yaitu pihak-

¹⁹ Mutiara Manalu, Nazwa Alpuja Elsa, & Gymnastiar Febriani, "Etika Bisnis Islam," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4, no. 1 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2025): 6-7, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4695>.

²⁰ Manalu, Elsa, & Febriani, "Etika Bisnis Islam," 5

pihak yang terlibat (penjual dan pembeli), barang yang diperjualbelikan, pernyataan penawaran dan penerimaan (ijab qabul), serta nilai tukar yang disepakati.²¹ Dalam praktik jual beli, etika bisnis Islam memiliki prinsip-prinsip yang mengatur dan mengelola bisnis sesuai dengan nilai moral dan norma-norma Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kesatuan (tauhid), keseimbangan atau keadilan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan Ihsan²².

3. Obat generik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/068/I/2010. Obat bermerek dagang adalah obat generik yang memiliki nama dagang khusus, nama tersebut merupakan milik produsen obat yang menghasilkan produk tersebut. Dari satu nama generik dapat di produksi berbagai macam sediaan obat dengan nama dagang yang berbeda.²³ Obat generik adalah obat yang memiliki kandungan zat aktif yang sama dengan obat bermerek, sehingga memiliki efek terapi yang sama.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi uraian pembahasan, agar lebih mudah peneliti memberikan gambaran umum mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut.

²¹ Azahra Eka Putri, Dwi Septi Nuraeni, Lilis Renfiana, 2023, "Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara)," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1 No, 6 (IAIN Metro 2023): 264 <https://doi.org/10.61132/santri.v1i6.130>.

²² Putri, Nuraeni, Renfiana, "Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara)," 262-263

²³ Kemkes Diktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2023, "Perbedaan Obat Generik dan Obat Paten," https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2868/perbedaan-obat-generik-dan-obat-paten, 13 November 2024, pukul 20:40 WIB.

Bab I Pendahuluan di dalam bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka di dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan landasan teori. Kajian teori mencakup prinsip etika bisnis islam, jual beli, dan regulasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan standar kelayakan pelayanan kefarmasian sebagai landasan hukum untuk menganalisis penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian di dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis di dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu gambaran umum praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa, hasil wawancara dengan informan, daftar harga obat generik di Apotek Puspa, serta dokumen pendukung. Bagian ini juga menguraikan analisis dan pembahasan temuan dalam penerapan prinsip kejujuran dan keadilan perspektif etika bisnis islam.

Bab V Penutup di dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan atau hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu seperti skripsi dan jurnal penelitian. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang bisa dijadikan tinjauan pustaka terhadap penelitiannya, sebagai berikut:

1. Jurnal penelitian Rianti pada tahun 2021 yang berjudul “*Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Bel Pada Marketplace Lazada.*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online di marketplace Lazada serta memberikan pemahaman mengenai bagaimana moral dan etika bisnis muncul sebagai bagian dari kesadaran pelaku usaha online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam transaksi jual beli di marketplace Lazada. Hal ini terlihat dari adanya praktik ketidakjujuran penjual dalam menampilkan gambar produk yang tidak sesuai dengan barang yang diterima konsumen serta sikap kurangnya tanggung jawab penjual terhadap keluhan konsumen, sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pembeli.²⁴

²⁴ Rianti, “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Bel Pada Marketplace Lazada.” *Journal Of Economics And Business Research*, 1, no. 1 (IAIN Ponorogo, 2021): 13, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2021&q=etika+bisnis+Islam++terhadap+praktek+jual+beli+&btnG=#d=gs_qabs&t=1761013319991&u=%23p%3DwoHn66W5PbUJ.

Persamaan penelitian Rianti dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, penggunaan etika bisnis Islam sebagai variabel independen, serta teknik pengambilan sampel purposive sampling. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Rianti berfokus pada transaksi jual beli online di marketplace Lazada, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli obat generik di apotek.

2. Jurnal penelitian Diah Armin Rosidah pada tahun 2021 dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun.”* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam terhadap penetapan harga dan kualitas produk dalam praktik jual beli obat generik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga obat generik di Apotek Rayhan Farma belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai etika bisnis Islam karena adanya penetapan harga yang relatif tinggi demi memperoleh keuntungan. Praktik tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip tanggung jawab dalam etika bisnis Islam. Namun, dari sisi kualitas produk, praktik jual beli obat generik dinilai telah sesuai dengan etika bisnis Islam karena

adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam pergantian merek obat serta kualitas produk yang diberikan lebih baik.²⁵

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, etika bisnis Islam sebagai variabel independen, serta teknik purposive sampling. Perbedaannya terletak pada lokasi dan subjek penelitian, yaitu Apotek Rayhan Farma di Kecamatan Pagotan Kabupaten Madiun, serta penggunaan pendekatan penelitian deduktif, sedangkan penelitian ini dilakukan di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3. Jurnal penelitian Sandra Novianing Tyastuti pada tahun 2021 yang berjudul *“Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.”* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan etika bisnis Islam terhadap pelaksanaan akad dalam jual beli pupuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe belum sepenuhnya menerapkan prinsip etika bisnis Islam, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual serta keluhan dari

²⁵ Diah Armin Rosidah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 67, [https://etheses.iainponorogo.ac.id/18394/1/Skripsi%20DIAH%20ARMIN%20ROSIDAH%20210216039%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20\(ethesis\).pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/18394/1/Skripsi%20DIAH%20ARMIN%20ROSIDAH%20210216039%20Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20(ethesis).pdf).

pembeli terkait kualitas pupuk yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan metode penelitian kualitatif, variabel etika bisnis Islam, serta pendekatan deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu praktik jual beli pupuk di Gapoktan Desa Jimbe, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan, yaitu sampling jenuh.

4. Jurnal penelitian Meri Anti Khusnawati, Ima Frafika Sari, Marsha Falia Rifai, & Ravinza Husen Samudra, pada tahun 2022 “*Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam,*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli tanpa pencantuman harga serta perbedaan penetapan harga antara wisatawan lokal dan luar kota di Pantai Pancer Door Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanpa mencantumkan harga dilakukan karena ketidakstabilan harga bahan baku dan tradisi setempat. Meskipun pedagang bersedia menjelaskan harga apabila ditanya, perbedaan harga antara wisatawan lokal dan luar kota dinilai melanggar prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan, serta larangan tadlis dalam etika bisnis Islam.²⁷

²⁶ Sandra Novianing Tyastuti, “Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), 62, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/13776/1/sandra%20upload%20e%20theses.pdf>.

²⁷ Meri Anti Khusnawati, Ima Frafika Sari, Marsha Falia Rifai, & Ravinza Husen Samudra, “Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Antologi*

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk penelitian lapangan (*field research*), serta teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang berfokus pada praktik jual beli di destinasi wisata serta penggunaan analisis induktif.

5. Jurnal penelitian Nadhatul Munawaroh pada tahun 2022 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli saren sebagai obat serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saren yang berasal dari darah ayam hukumnya najis dan haram menurut hukum Islam sehingga tidak memenuhi syarat sah jual beli.

Selain itu, dari sisi medis, saren dinilai berisiko dan penggunaannya tidak dalam kondisi darurat.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan metode penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif, serta kajian terhadap praktik jual beli dalam perspektif Islam. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu jual beli saren

Hukum, 2, no. 2 (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022): 219. DOI: [10.21154/antologihukum.v2i2.1341](https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1341).

²⁸ Nadhatul Munawaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), 77, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18571/>.

sebagai obat, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan berupa sampling jenuh.

6. Jurnal penelitian Anisa Oktaviani, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti pada tahun 2023 yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Parfum Refill (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli parfum isi ulang serta menganalisisnya dari perspektif etika bisnis Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan metode penelitian kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku usaha parfum refill di Kecamatan Bandung Kulon.²⁹

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli parfum refill belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, khususnya pada prinsip tanggung jawab dan kebenaran, karena masih terdapat toko yang tidak mencantumkan komposisi bahan, tanggal kedaluwarsa, serta tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang dialami konsumen. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan metode kualitatif dan variabel

²⁹ Anisa Oktaviani, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Parfum Refill (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon,” *Jurnal Sharia Economic Law*, 3 no. 1 (universitas islam Bandung, 2023): 217, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.6731>.

etika bisnis Islam, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan teknik pengambilan sampel.

7. Jurnal penelitian Tiara Fadillah, Sri Ramadhani, Rahmat Daim Harahap pada tahun 2023 dengan judul “*Etika Bisnis Islam: Praktik Jual Beli Obat Sirup Anak Pada Apotik di Kecamatan Secanggang.*”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli obat sirup anak di apotek. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif, yang menitikberatkan pada pemahaman fenomena berdasarkan data lapangan.³⁰

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli obat sirup anak telah dijalankan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan pengawasan BPOM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang difokuskan pada obat sirup anak.

8. Jurnal penelitian Anisyah pada tahun 2023 dengan judul “*Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa*

³⁰ Tiara, Fadillah, Sri Ramadhani, Rahmat Daim Harahap, “Etika Bisnis Islam: Praktik Jual Beli Obat Sirup Anak Pada Apotik Di Kecamatan Secanggang,” *Manajemen Studies And Entrepreneurship Journal*, 4 no. 5 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023): 5020, <https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2192>.

Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu).” Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter berdasarkan hukum ekonomi syariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mengkaji praktik di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam.³¹

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli obat daftar G tanpa resep dokter diperbolehkan menurut hukum Islam selama tidak berlebihan, tidak membahayakan kesehatan, dan telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat (*al-‘urf al-‘amm*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian dan objek kajian.

9. Jurnal penelitian Septiani, M.Faud Hadziq pada tahun 2023 yang berjudul “*Implementasi Etika Bisnis Islam pada sistem Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam proses jual beli di pasar tradisional, khususnya terkait kejujuran, keadilan, dan pelayanan. Pendekatan

³¹ Anisyah, 2023, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu),” (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), 60, <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/778/>.

penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif.³²

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun etika bisnis Islam telah diterapkan, masih ditemukan pelanggaran seperti penipuan dan ketidakadilan harga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan metode kualitatif dan variabel etika bisnis Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yang berfokus pada pasar tradisional.

10. Jurnal Penelitian Nunik Widiastuti, pada tahun 2024 yang berjudul “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.*” Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan serta menganalisisnya berdasarkan etika bisnis Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*).³³

³² Septiani, M.Faud Hadziq, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada sistem Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, no. 3 (Universitas Terbuka 2023): 4065, [Http://dx.doi.org/10.2040/jiei.v9i3.9933](http://dx.doi.org/10.2040/jiei.v9i3.9933).

³³ Nunik Widiastuti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024), 68, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2021&q=etika+bisnis+Islam++terhadap+praktek+jual+beli+&btnG=#d=gs_qabs&t=1761013648638&u=%23p%3DHvolO1zFv-wJ.

Jenis penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan teknik pengambilan sampel total sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli cengkeh dengan sistem tebasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, terutama terkait kejujuran, tanggung jawab, dan kebebasan dalam penentuan harga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pendekatan kualitatif dan kajian etika bisnis Islam, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan teknik pengambilan sampel.

Tabel 2.1

Jumlah Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Rianti	2021	Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada	1) sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas ekonomi. 2) pendekatan penelitian deskriptif. 3) jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan. 4) teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. 5) Teknik pengambilansampel yaitu purposive sampling.	Penelitian Terdahulu: Subjek yang digunakan adalah Transaksi Jual Bel Pada Marketplace Lazada. Penelitian ini: Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
2.	Diah Armin Rosidah	2021	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1) sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam di apotek. 2) Jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan. 3) Teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. 4) Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 	<p>Penelitian Terdahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek yang digunakan adalah Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun. 2) Pendekatan penelitian deduktif <p>Penelitian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. 2) Pendekatan penelitian deskriptif
3.	Sandra Novianing Tyastuti	2021	Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.	<ol style="list-style-type: none"> 1) membahas penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas ekonomi. 2) Jenis penelitian 	

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
					<p>adalah field research atau penelitian lapangan.</p> <p>3) Teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi</p> <p>Pendekatan penelitian deskriptif</p>
4.	Meri Anti Khusnawati , Ima Frafika Sari, Marsha Falia Rifai, Ravinza Husen Samudra.	2022	Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam	<p>1) sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam di apotek.</p> <p>2) Jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan.</p> <p>3) Teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi.</p> <p>Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling</p>	<p>Penelitian Terdahulu:</p> <p>1) Subjek yang digunakan adalah Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata</p> <p>2) Metode analisis induktif.</p> <p>Penelitian ini:</p> <p>1) Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Metode analisis deskriptif</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
5.	Nadhatul Munawaroh	2022	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo	1) Sama-sama mengkaji prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran dan transparansi. 2) jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan. teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi.	Penelitian Terdahulu: 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. 2) teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Penelitian ini: 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. pengambilan sampel yaitu purposive sampling.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
6.	Anisa Oktaviani, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti	2023	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Parfum Refill (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon	1) Sama-sama membahas penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli. Teknik Pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi.	<p>Penelitian Terdahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek yang digunakan adalah Jual Beli Parfum Refill (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon 2) Pendekatan penelitian empiris. 3) Teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh <p>Penelitian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. 2) Pendekatan penelitian deskriptif. <p>Teknik pengambilan sampel purposive sampling.</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
7.	Tiara Fadillah, Sri Ramadhani, Rahmat Daim Harahap	2023	Etika Bisnis Islam: Praktik Jual Beli Obat Sirup Anak Pada Apotik Di Kecamatan Secanggang	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam di apotek. 2) teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. 3) Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Pendekatan penelitian deskriptif. 	<p>Penelitian Terdahulu: Subjek yang digunakan adalah Praktik Jual Beli Sirup Anak Pada Apotek di Kecamatan Secanggang</p> <p>Penelitian ini: Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.</p>
8.	Anisyah	2023	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)	<ol style="list-style-type: none"> 1) membahas penerapan etika bisnis Islam terhadap penjualan obat. 2) teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 3) jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan. 4) teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. 	<p>Penelitian Terdahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter. 2) pendekatan penelitian yuridis empiris. <p>Penelitian ini: 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di</p>

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
					Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. pendekatan penelitian deskriptif.
9.	Septiani, M. Faud Hadziq	2023	Implementasi Etika Bisnis Islam pada sistem Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sama-sama membahas penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli. 2) metode deskriptif-kualitatif. 3) jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan. 4) teknik pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi. teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 	<p>Penelitian Terdahulu: Subjek yang digunakan adalah Jual Beli: Studi Kasus di Pasar Tradisional.</p> <p>Penelitian ini: Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.</p>
10.	Nunik Widiastuti	2024	Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung	<ol style="list-style-type: none"> 1) sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas ekonomi. 2) pendekatan penelitian deskriptif 3) jenis penelitian adalah field research atau penelitian lapangan. teknik pengumpulan data dari hasil 	<p>Penelitian Terdahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Subjek yang digunakan adalah Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
			Kabupaten Ponorogo	wawancara dan observasi.	Kabupaten Ponorogo. 2) Metode analisis induktif. Penelitian ini: 1) Subjek yang digunakan adalah Praktek jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember. Metode analisis deskriptif.

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2024

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji menunjukkan adanya persamaan dengan penelitian ini. antara lain dalam hal fokus kajian mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan ekonomi, pendekatan penelitian deskriptif, jenis penelitian lapangan, serta metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Beberapa penelitian juga menerapkan teknik purposive sampling yang sama seperti dalam penelitian ini. Sementara itu, perbedaan mendasar terletak pada objek penelitian. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik jual beli obat generik di apotek wilayah Kaliwates, Kabupaten Jember, sedangkan penelitian terdahulu menyoroti berbagai bentuk aktivitas jual beli di sektor lain, seperti hasil pertanian, pasar tradisional, destinasi wisata, hingga obat generik di wilayah berbeda. Selain itu, terdapat variasi teknik pengambilan sampel

dan pendekatan analisis yang digunakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam memperkaya kajian mengenai penerapan etika bisnis Islam, khususnya di sektor farmasi.

B. Kajian Teori

1. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis

Dalam Etika bisnis adalah bidang studi yang mempelajari tindakan baik dan buruk dalam hubungan bisnis antara pelaku usaha dan para pihak yang terkait. Etika bisnis mengacu pada pendekatan dari ilmu manajemen dan hukum sebagai dasar dalam praktik bisnis guna mencapai tujuan (*goals*) organisasi. Pencapaian tujuan tersebut menuntut adanya etika, yaitu perilaku manusia (*human conduct*) yang mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam kegiatan bisnis.³⁴

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan norma yang berasal dari ajaran Islam yang mengatur perilaku individu dan pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mencapai keadilan, keuntungan, dan keberkahan dalam kegiatan bisnis.³⁵

Perdagangan memiliki peran penting dalam ekonomi Islam. Rasulullah

³⁴ Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya. *Etika Bisnis Syariah*, (Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), 6, <https://eprints.umg.ac.id>. 1 September 2025, pukul 12:21 WIB.

³⁵ Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, M. Amin Qodri, "*Etika Bisnis Islam*," (Bandung: Widina Media Utama, 2024), 14, <https://repository.penerbitwidina.com/publications/569686/etika-bisnis-islam>.

menghargai transaksi di pasar yang berlangsung secara adil. Oleh karena itu, Islam menekankan moralitas seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini menjadi tanggung jawab setiap pedagang dan mencerminkan keimanan kepada Allah. Rasulullah sendiri bertindak sebagai muhtasib, menegur praktik perdagangan yang melanggar moralitas, berdasarkan asas-asas yang dipandu oleh wahyu, seperti firman Allah.³⁶

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisā' [4]:29

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. An-Nisā' [4]:30³⁷

b. Tujuan Etika Bisnis Islam

Berdasarkan pandangan Dr. Syahata yang dikutip dalam penelitian Rudi Hartono dkk (2025), tujuan umum etika bisnis Islam merupakan elemen penting yang membekali para pelaku usaha dengan berbagai keterampilan dan pemahaman moral dalam menjalankan kegiatan bisnis. Tujuan tersebut meliputi Etika bisnis Islam bertujuan untuk

³⁶ Malahayatie, *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)*, (Aceh: Cv. Sefa Bumi Persada, 2022), 20-21 <https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/160>.

³⁷ Al-Quran QS. An-Nisā' [4]:30.

membimbing, mengembangkan, dan memberikan pedoman bagi aktivitas bisnis, memastikannya dijalankan secara etis dan bertanggung jawab. Etika ini berfungsi sebagai landasan moral dan etika bagi para pemimpin bisnis, yang memandu tindakan mereka menuju tanggung jawab pribadi, perusahaan, dan spiritual mereka kepada Allah. Etika bisnis Islam juga berperan dalam penelitian, memastikan perilaku etis tanpa menggunakan tindakan disipliner. Etika bisnis Islam juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai-nilai Islam dan membina hubungan positif antara bisnis dan masyarakat, serta mendorong keselarasan antara sumber daya material dan manusia.³⁸

c. Nilai Etika Bisnis Islam

- 1) Keadilan, dalam perspektif etika bisnis islam keadilan didefinisikan sebagai perlakuan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Prinsip ini menegaskan praktek yang merugikan atau mengeskplotasi pihak lain dilarang. Jika ada keadilan, keputusan bisnis seperti penentuan harga, gaji, dan bagaimana memperlakukan mitra dapat dibuat secara objektif dan sesuai dengan nilai moral Islam.
- 2) Kejujuran, merupakan dasar utama dalam etika bisnis islam karena memerlukan sikap terbuka dan transparan dalam setiap aktivitas usaha. Kejujuran tidak hanya mencegah tindakan menipu atau

³⁸ Rudi Hartono, Maisarah, Pira Yulisman, Dan Recy Fitrya Murni, 2025, "Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spiritualitas," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2, no. 2 (UIN Imam Bonjol Padang 2025): 244, mengutip pendapat Dr. Syahata, DOI: <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>.

berbohong, tetapi juga mencakup penyampaian informasi secara jelas, pemenuhan komitmen, serta penghormatan terhadap perjanjian. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan masyarakat akan lebih mempercayai usaha tersebut dan usaha akan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

- 3) Amanah menekankan tanggung jawab para pelaku usaha terhadap kepercayaan yang diberikan oleh konsumen, karyawan, atau mitra bisnis. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga kualitas produk atau layanan, melakukan transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam proses bisnis. Prinsip amanah berperan penting dalam membantu pelaku usaha menjaga reputasi mereka dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak.
- 4) Tanggung Jawab Sosial, Etika bisnis Islam juga menekankan tanggung jawab sosial, yaitu kewajiban para pelaku usaha untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan utama bisnis tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga mementingkan nilai-nilai kemanusiaan serta keberlanjutan hidup.³⁹

c. Prinsip-prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

1) Prinsip Ketahuidan

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan bisnis harus didasarkan pada keesaan Allah SWT. Artinya, setiap tindakan yang

³⁹ Zakiyah, Makhshushi; Nafiuddin; Rahmani; Wati, dalam Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya, *Etika Bisnis Syariah*, (Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia), 2024, 8-9, <https://eprints.umg.ac.id>.

dilakukan oleh pelaku usaha baik dalam proses produksi, distribusi, pelayanan, maupun transaksi harus mencerminkan nilai-nilai tauhid dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Dengan menerapkan prinsip ini, seorang pelaku usaha akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri serta memiliki kesadaran spiritual (*self-control dan self-supervision*) dalam berbisnis, sehingga mendorong lahirnya perilaku yang jujur, amanah, dan berorientasi pada kebaikan.⁴⁰

2) Prinsip Keilmuan

Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh seorang wirausaha muslim harus didasari dengan pengetahuan yang memadai. Dalam konteks ini, ilmu mencakup berbagai aspek dalam dunia bisnis, mulai dari proses produksi, konsumsi, hingga distribusi. Seorang pengusaha muslim yang ingin memulai usaha sebaiknya memahami terlebih dahulu berbagai hal yang berkaitan dengan bisnisnya, seperti bahan yang digunakan, strategi pemasaran, proses produksi, hingga cara promosi yang tepat. Pemahaman ini sangat penting, karena dengan dasar ilmu, kegiatan usaha dapat berjalan secara benar dan memberikan manfaat serta keberkahan, yang pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan. Sebaliknya, jika seseorang menjalankan usaha tanpa dilandasi ilmu, maka besar kemungkinan ia akan bertindak sembarangan, melakukan kesalahan, bahkan menimbulkan kerugian atau kerusakan. Oleh karena itu, prinsip keilmuan memiliki peran

⁴⁰ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 41-42, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

penting dalam memastikan keberlangsungan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴¹

3) Prinsip Keadilan

Perinsip keadilan (*al- 'adl*) adalah sikap menempatkan sesuatu pada posisi yang seharusnya atau bersikap proporsional, yaitu memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kadar dan bagian masing-masing. Dalam konteks wirausaha syariah, perilaku adil menjadi cerminan utama yang harus selalu dijaga oleh setiap pelaku bisnis. Prinsip keadilan wajib diterapkan dalam semua aktivitas usaha, termasuk dalam pelayanan kepada konsumen. Misalnya, seorang pengusaha tidak boleh membeda-bedakan perlakuan terhadap konsumen yang kaya dengan yang miskin; keduanya harus diperlakukan sama dan layak. Penerapan prinsip keadilan juga akan menciptakan keseimbangan dalam kegiatan perdagangan.

Keseimbangan tersebut mencakup hubungan yang harmonis antara penjual dan pembeli, serta keterpaduan antara aspek ekonomi dan nilai-nilai sosial dalam berbagai aktivitas bisnis.⁴²

4) Prinsip Tanggungjawab

Tanggung jawab berarti kemampuan seseorang untuk menanggung segala konsekuensi yang muncul akibat tindakan atau ucapan yang telah dilakukannya dalam kegiatan bisnis. Misalnya, seorang pedagang memiliki tanggung jawab penuh terhadap barang atau jasa yang

⁴¹ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 42-43.

⁴² Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 43.

ditawarkannya, baik dari segi kualitas maupun jumlahnya. Sikap bertanggung jawab terhadap produk merupakan hal yang mendasari dalam kegiatan perdagangan, karena dari sini timbul rasa percaya dari konsumen. Kepercayaan tersebut akan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha. Sebaliknya, jika seorang pedagang bersikap tidak peduli, mengabaikan kewajibannya, dan tidak menunjukkan rasa tanggung jawab, maka hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan konsumen serta menurunnya reputasi usaha. Dengan demikian, tanggung jawab dalam bisnis tidak hanya berkaitan dengan produk saja, tetapi juga mencakup seluruh tindakan dan ucapan yang dilakukan selama menjalankan usaha.⁴³

5) Prinsip Kebebasan

Dalam konteks ini, kebebasan tidak berarti bebas bertindak tanpa batas atau tanpa aturan, melainkan kebebasan yang tetap dibatasi oleh ketentuan dan nilai-nilai syariah. Artinya, setiap pelaku usaha memiliki ruang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan bisnisnya, namun tetap berada dalam lingkaran hukum Islam. Kebebasan ini mencakup hak seorang wirausaha untuk menentukan jenis barang yang diperdagangkan, memilih mitra bisnis, serta mengatur kegiatan usahanya tanpa ada tekanan dari pihak lain. Namun, kebebasan tersebut tidak boleh dipahami sebagai kebebasan yang tanpa batas, karena hal itu justru bertentangan dengan prinsip syariah lainnya.

⁴³ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 44-45.

Dalam Islam, kebebasan selalu diiringi dengan tanggung jawab moral dan aturan yang jelas. Oleh karena itu, kebebasan dalam berbisnis hanya berlaku dalam batas-batas yang disyariatkan, seperti menjual barang yang halal, menggunakan metode pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam, serta menjaga etika dalam ucapan dan perilaku. Dengan demikian, prinsip kebebasan dalam bisnis Islam memberikan ruang untuk bertindak, tetapi tetap dalam bingkai nilai-nilai keislaman.⁴⁴

6) Prinsip Kebajikan (ihsan)

Ihsan adalah melakukan kebaikan dan berpikir bijak dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas berwirausaha. Dalam konteks bisnis, berpikir bijak tidak hanya mencakup hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga melibatkan sikap terhadap lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Seorang pengusaha yang beragama Islam diharuskan bersikap bijak dalam berbicara, mengambil keputusan, serta memperlakukan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnisnya, seperti rekan bisnis, pelanggan, pesaing, masyarakat, dan pemerintah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan dalam bisnis harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan, rasa peduli, serta tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan prinsip kebajikan, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan, menjaga keharmonisan, serta memberikan manfaat yang luas kepada sesama.

⁴⁴ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 45-46.

7) Prinsip Halal dan Haram

Prinsip halal dan haram adalah mencari penghasilan yang halal dan menjauhi segala sesuatu yang haram. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk digunakan dan dimanfaatkan karena memberi manfaat. Sementara haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk dikonsumsi, digunakan, atau bahkan disentuh karena dapat menimbulkan kerusakan.⁴⁵

Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”⁴⁶

Demikian pula dalam Surah Al-Mu'minun ayat 51:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: “Wahai para rasul, makanlah dari (makanan) yang baik-baik dan beramalsalehlah. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁷

Dari ayat-ayat tersebut dapat dilihat bahwa perintah untuk mengonsumsi dan mencari hal halal tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman, tetapi juga bagi seluruh manusia. Halal memberikan kebaikan dan keberkahan, sedangkan haram menyebabkan kerusakan dan malu, baik secara fisik, moral, maupun spiritual. Karena itu, dalam berbagai kegiatan bisnis, seorang muslim wajib memastikan

⁴⁵ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 47.

⁴⁶ Al-Qur'an QS. Al-Baqarah [2]:168

⁴⁷ Al-Qur'an QS. Al-Mu'minun [23]:51.

segala transaksi, produk, serta cara mendapatkan keuntungan dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah.

d. Sikap Fundamental Pelaku Bisnis

Sikap dasar para pelaku bisnis Muslim mencerminkan karakter seorang muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sikap tersebut mencakup empat nilai penting, yaitu shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (cerdas).⁴⁸ Keempat nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam berbisnis, seorang pelaku usaha tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus menjaga kejujuran, kesopanan, dan kemampuan berpikir cerdas dalam mengambil keputusan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, berbagai kegiatan bisnis dapat berjalan secara adil, memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan orang lain.

2. Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari Kata (*al-bai'u*) yang secara bahasa berarti “memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar menukar”. Istilah lain dari jual beli adalah perdagangan (tjarah). Menurut istilah ahli fiqh, jual beli adalah “tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.” Atau pengertian lain adalah, suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai

⁴⁸ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 49.

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara'.⁴⁹

a. Ketentuan jual beli

Transaksi jual beli dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat seperti adanya penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga yang ditentukan, serta kesepakatan yang jelas. Salah satu prinsip utama dalam jual beli adalah prinsip suka sama suka, yang berarti jual beli tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau menipu. Selain itu, Islam juga melarang praktek yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam jual beli. Barang yang dijual harus halal, bermanfaat, dan memiliki kualitas serta jumlah yang jelas. Penjual wajib memberikan informasi secara jujur dan transparan, tidak boleh menyembunyikan kekurangan, menipu harga, atau memberi kesan bahwa barang itu lebih baik dari kenyataannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat, misalnya larangan menjual barang najis seperti arak dan bangkai seperti tercatat dalam hadis (HR. Bukhari-Muslim), serta prinsip bahwa barang yang dijual milik penjual sendiri (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Selain itu, Al-Qur'an juga melarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah (QS. An-Nisa': 29).⁵⁰

⁴⁹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 17-18, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>.

⁵⁰ Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, 19-23.

Oleh karena itu, transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah tidak hanya dilihat dari aspek sahnya akad, tetapi juga dari nilai-nilai moral seperti transparansi, keadilan, dan kejujuran. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus bebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan informasi, atau praktik yang merugikan salah satu pihak.

b. Mekanisme pasar dalam islam

1) Kebijakan regulasi harga

Konsep Islam dalam menetapkan regulasi harga bergantung pada dua faktor utama, yakni: (1) sebab perubahan harga dan (2) pentingnya harga bagi kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat. Penyebab perubahan harga dapat diklasifikasikan secara umum menjadi dua faktor, yaitu;

(a) *Genuine factors*, adalah faktor-faktor yang bersifat alamiah.

Langkah yang diambil untuk menjaga stabilitas harga adalah melalui campur tangan dalam pasar, dengan memengaruhi posisi permintaan di pasar atau disertai dengan penawaran yang dapat membantu menciptakan harga yang lebih sesuai.

(b) *Non genuine factors*, adalah faktor-faktor yang menyebabkan gangguan terhadap kelancaran mekanisme pasar yang bebas.

Kebijakan yang sedang dijalankan untuk menjaga harga tetap stabil, langkah yang dapat diambil adalah mengatasi sumber

distorsi tersebut agar mekanisme pasar dapat berfungsi dengan baik, termasuk dengan menggunakan penetapan harga.

Apabila masyarakat sangat memerlukan suatu barang atau jasa meski harga pasar benar-benar tidak terjangkau, maka pemerintah bisa melakukan intervensi harga. Situasi ini bisa disebut darurat, karena merupakan situasi yang sangat diperlukan. Oleh karena itu, Petunjuk Darurat juga harus diterapkan.⁵¹

2) Penetapan harga

Islam memandang mekanisme pasar sebagai sesuatu yang alami, sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Penentuan harga dalam ekonomi Islam dilakukan melalui kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran, yang harus berlangsung secara sukarela tanpa paksaan atau ketidakadilan. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa perubahan harga bergantung pada fluktuasi permintaan dan penawaran, sementara Adiwarmanto Karim menekankan pentingnya kesepakatan rela sama rela dalam transaksi. Harga keseimbangan yang terbentuk melalui mekanisme pasar ini disebut sebagai *saman misl* (*price equivalent*) dalam hukum Islam.⁵²

Intervensi pasar dilakukan hanya jika terjadi distorsi dalam permintaan dan penawaran. Pemerintah dapat mengendalikan harga

⁵¹ Isnaini Harahap, dan M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, cetakan pertama (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), 107-108, <http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The%20handbook%20of%20islamic%20economics%20ok.pdf>.

⁵² Harahap, dan Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, 113-114

dengan menghilangkan distorsi tersebut, termasuk melalui intervensi langsung, seperti menjual atau membeli barang untuk menjaga harga keseimbangan yang wajar. Sebagai pelaku pasar, pemerintah diperbolehkan bertindak jika kenaikan harga disebabkan oleh gangguan pada supply dan demand.⁵³ Para ahli fiqh menyimpulkan bahwa intervensi pasar diperbolehkan jika:

- (a) Melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga margin keuntungan penjual dan daya beli pembeli.
- (b) Mencegah penjual menaikkan harga secara tidak wajar, seperti dengan ihtikar (penimbunan) atau ghaban fahisy (harga terlalu tinggi).
- (c) Membela kepentingan pembeli, yang mewakili kelompok masyarakat lebih luas dibandingkan penjual.
- (d) Produsen menolak menjual kecuali dengan harga yang jauh lebih tinggi, meskipun konsumen membutuhkan barang tersebut.
- (e) Harga yang diinginkan produsen terlalu tinggi, sedangkan harga permintaan konsumen terlalu rendah. Dalam hal ini, pemerintah memfasilitasi musyawarah antara keduanya, meninjau demand, supply, dan biaya produksi, lalu menetapkan harga yang adil.

⁵³ Harahap, dan Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, 115.

(f) Penyedia jasa menolak bekerja kecuali dengan harga lebih tinggi dari harga pasar, meskipun jasa tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.⁵⁴

c. Etika dalam Pengelolaan Pemasaran Menurut Islam

Pengelolaan pemasaran dari sudut pandang etika bisnis islam harus didasarkan pada prinsip moral dan peraturan syariah. Pada aspek penentuan harga etika yang harus diperhatikan meliputi beberapa hal, yaitu: menetapkan beban biaya produksi yang wajar; menjadikan harga sebagai alat kompetisi yang sehat; mempertimbangkan daya beli masyarakat; menentukan keuntungan secara adil; serta memanfaatkan harga sebagai sarana untuk menarik konsumen tanpa menipu atau merugikan pihak lain. Dengan demikian, penetapan harga bukan hanya untuk meraih keuntungan semata, tetapi juga mencerminkan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap konsumen.⁵⁵

3. Obat Generik dalam Aspek Regulasi dan Etika Pelayanan

a. Pengertian Obat Generik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/1/2010 tentang kewajiban penggunaan obat generik di fasilitas layanan kesehatan pemerintah. Obat generik merupakan obat yang memiliki nama resmi *International Non Proprietary*

⁵⁴ Harahap, dan Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, 116

⁵⁵ Usnan, *Etika Bisnis Islam: Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, (Jakarta: Gerbang Media Aksara, 2021), 69-70, <https://share.google/U3XXxWDEBwCvIgILL>.

Names (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya terkait zat aktif yang terkandung di dalamnya.⁵⁶

Obat generik merupakan obat yang memiliki nama yang sama dengan nama kimianya, sehingga tidak memiliki merek. Obat generik adalah obat yang telah melewati masa patennya, yang memungkinkan perusahaan farmasi lain untuk memproduksi dan menjual obat tersebut tanpa harus membayar royalti. Dalam situasi ini, obat itu tidak lagi disebut dengan nama patennya, melainkan dengan nama generiknya, yang memungkinkannya perusahaan farmasi lain untuk memproduksi dan menjual obat tersebut tanpa harus membayar royalti. Dalam situasi ini, obat itu tidak lagi disebut dengan nama patennya, melainkan dengan nama generiknya, yaitu nama umum yang telah ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia.⁵⁷

b. Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

Pasal 4 dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 mengatur tentang pemberian informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi Obat, diantaranya:

1. Harga Eceran Tertinggi pada label, yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk produk selain obat generik, ditetapkan dengan

⁵⁶ BKPK KEMENKES, 2024, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/1/2010," Jakarta Selatan. <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/43ed7849-8f93-43e0-8186-06eacb9aff4b/yg>, 22 November 2024, pukul 04.17 WIB

⁵⁷ Laili Nur Azizah., *Buku Ajar Farmakologis Keperawatan*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 39, <https://respository.stikesrsadgs.ac.id>.

menambahkan biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28 persen dari harga netto apotek.

2. Apabila obat generik tidak terdaftar dalam katalog elektronik (*e-catalogue*), informasi Harga Eceran Tertinggi yang tercantum pada label berupa nilai nominal yang merujuk pada harga yang telah ditetapkan dengan keputusan menteri.
3. Informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi dijelaskan dalam formula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b. Dimana, harga eceran tertinggi sama dengan harga obat di katalog elektronik setiap provinsi, ditambah biaya pelayanan kefarmasian sebesar 28 persen dari harga di katalog elektronik setiap provinsi.⁵⁸

c. Pelindungan Konsumen

Berdasarkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi, jaminan, barang dan/atau layanan, serta memberikan penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan, termasuk pemeliharaan.
3. Menangani pelanggan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.⁵⁹

⁵⁸ Peraturan Menteri Kesehatan No 98 Tahun 2015 Pemberian Informasi HET pada Obat.

⁵⁹ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (n.d.), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

d. Etika Pelayanan di Apotek

Etika pelayanan publik merupakan pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang belandaskan nilai moral, norma sosial, dan aturan hukum yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan standar kebaikan. Etika ini menekankan pentingnya sikap dan perilaku seseorang dalam berinteraksi, baik di lingkungan sosial maupun organisasi pelayanan publik.⁶⁰ Dengan demikian, dalam konteks pelayanan di apotek, etika pelayanan tidak hanya mencakup aspek teknis dalam pemberian obat kepada pasien, tetapi juga menuntut adanya kejujuran, tanggungjawab, dan profesionalisme dari tenaga kefarmasian dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dijelaskan ketentuan yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian di apotek.

1. Pasal 1

Berdasarkan Pasal 1, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat tenaga kefarmasian, khususnya apoteker, melaksanakan tugasnya, sedangkan standar pelayanan kefarmasian berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian tersebut.⁶¹

⁶⁰ Mifnatul Mukharomah, Mei Santi, "Etika Pelayanan *Usaha Food Court Perspektif Ekonomi Islam* (Studi Pada Queen Resto Kelurahan Bago Tulungagung)," *jurnal ekonomi syariah*, 08, no. 01, (tulungagung: 2021), 51, <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>.

⁶¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 1.

2. Pasal 2

Pasal ini menjelaskan bahwa penentuan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memastikan perlindungan hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional demi memastikan keselamatan pasien.⁶² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan di apotek tidak hanya terbatas pada aktivitas menjual obat, tetapi juga mencakup aspek nilai moral dan tanggung jawab profesional dalam memastikan keamanan dan manfaat penggunaan obat bagi masyarakat.

3. Pasal 3 ayat (1) huruf b

Pasal ini menyebutkan bahwa pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi, yaitu: pengkajian resep, dispensing, serta pelayanan informasi obat (PIO).⁶³ Ketiga aspek ini menjadi bagian penting dari pelayanan kefarmasian yang berkualitas, karena melibatkan proses mengevaluasi resep sesuai dengan kondisi pasien, mempersiapkan dan menyerahkan obat secara tepat, serta memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai cara penggunaan obat.

Berdasarkan penjelasan teori dan peraturan yang telah disampaikan, penelitian ini fokus pada penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam kegiatan jual beli obat generik di Apotek Puspa

⁶² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 2.

⁶³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 3 ayat (1).

yang berada di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pemilihan penekanan pada kedua prinsip ini berdasarkan fakta bahwa keduanya merupakan inti dari etika bisnis Islam, yang sangat berkaitan dengan perlindungan konsumen, penyampaian informasi harga secara transparan, serta penetapan harga yang adil. Prinsip kejujuran mengharuskan pelaku usaha menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada konsumen, sementara prinsip keadilan menuntut adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tanpa adanya keuntungan yang tidak seimbang bagi pihak tertentu.

Dengan fokus pada aspek ini, penjelasan mengenai teori, regulasi, serta praktik yang terdapat dalam bab ini akan menjadi dasar untuk menganalisis data empiris yang akan dibahas pada bab berikutnya. Hal ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana Apotek Puspa menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial berdasarkan kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.⁶⁴ Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalisis untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi jual beli obat generik sesuai dengan etika bisnis Islam.

B. Lokasi Penelitian

Apotek Puspa yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 217, Muktisari, Kelurahan Tegal besa, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi ini menggunakan teknik purposive sampling,

⁶⁴ Nurul Huda, Sofiah, "Kualitas Pelayanan Mesin Customer Service (CS) Digital Dalam Mengatasi Permasalahan Kartu ATM Nasabah Pada BCA KCP Besuki Situbondo," *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, no. 3 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2025), 200-201, Doi : <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.94>.

yaitu cara memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu.⁶⁵ Teknik ini dilakukan secara sengaja dengan memilih lokasi atau orang yang memiliki ciri, kriteria, dan karakteristik sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian, pemilihan sampel tidak dilakukan secara sembarangan.

Pemilihan Apotek Puspa didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, apotek ini secara aktif menjual obat generik dengan ketersediaan yang relatif lengkap, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan. Kedua, Apotek Puspa memiliki izin operasional resmi, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika. Ketiga, apotek ini bersedia memberikan akses informasi dan membuka ruang wawancara, sehingga memudahkan proses pengumpulan data. Selain itu, aktivitas jual beli di Apotek Puspa dapat diamati secara langsung oleh peneliti.

Adapun kriteria inklusif dalam pemilihan Apotek Puspa sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apotek telah berdiri minimal 15 tahun, sehingga memiliki pengalaman praktik jual beli yang stabil dan berkelanjutan.
2. Memiliki ketersediaan obat generik yang lengkap agar data yang diperoleh representatif.
3. Bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan peneliti.

⁶⁵ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta), 85, <https://share.google/rv4J3nNknVg4Uaech>.

4. Mudah diakses secara geografis untuk mendukung kelancaran penelitian lapangan.
5. Dikenal oleh masyarakat karena kualitas pelayanan yang ramah dan komunikatif, sehingga relevan untuk mengkaji penerapan prinsip etika bisnis Islam.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut informan, yang mana digunakan sebagai patner atau konsultan untuk mencari informasi yang dibutuhkan peneliti.⁶⁶ Para informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana kriteria utama adalah pihak internal apotek Puspa serta konsumen yang berada di apotek Puspa. Teknik purposive sampling adalah metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu.⁶⁷

Informan internal apotek dipilih karena mereka terlibat langsung dalam proses pengelolaan, pelayanan, serta transaksi jual beli obat generik. Pemilik apotek dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan penetapan harga dan pengelolaan usaha. Apoteker dan asisten apoteker dipilih karena memiliki peran penting dalam pelayanan kefarmasian, pemberian informasi obat, serta pengawasan mutu dan harga obat generik. Sementara itu, karyawan kasir dipilih karena terlibat langsung dalam proses transaksi pembayaran dan interaksi dengan konsumen.

⁶⁶ Salim dan Syahrur, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*," (Bandung: Citapuska Media, 2012), 142, <https://share.google/Q5sYCsMX20rlv2tNq>.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85, <https://share.google/rv4J3nNknVg4Uaech>.

Adapun informan konsumen dipilih karena mereka merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari praktik jual beli, khususnya terkait harga, pelayanan, dan kejujuran informasi yang diberikan oleh pihak apotek. Konsumen yang dijadikan informan merupakan konsumen yang pernah membeli obat generik di Apotek Puspa dan bersedia memberikan informasi secara terbuka berdasarkan pengalaman mereka. Pemilihan konsumen dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesediaan diwawancarai, serta keterlibatan langsung dalam transaksi, sehingga data yang diperoleh bersifat relevan dan mendalam. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Ibu Suharti Selaku Pemilik Apotek Puspa
2. Ibu Cicia Dwi Budi Winarsi Selaku Apoteker
3. Ibu Fildatul Hasanah selaku Asisten Apoteker
4. Sri Setiarti sebagai karyawan kasir
5. Konsumen Apotek Puspa, yaitu konsumen yang sering membeli obat generik di apotek puspa dan konsumen tetap atau pelanggan yang telah berulang kali berinteraksi. Konsumen terdiri dari sembilan orang dengan latar belakang dan pengalaman pembelian obat generik yang berbeda-beda. Adapun informan konsumen dalam penelitian ini yaitu :
 - a) Ibu Ayu
 - b) Bapak Matnul
 - c) Ibu Halimah
 - d) Ibu Cindy

- e) Ibu Yuni
- f) Ibu Rani
- g) Mbak Ajeng
- h) Mbak Wulan
- i) Mas Agus

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai sumber utama. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam kepada karyawan apotek untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli obat generik, serta dengan konsumen untuk mengetahui pengalaman dan persepsi mereka terkait harga, pelayanan dan penerapan etika bisnis islam di Apotek Puspa.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan cara meminta informasi dari pihak apotek mengenai daftar obat generik yang paling sering dibeli oleh konsumen beserta harga jualnya. Setelah memperoleh daftar tersebut, peneliti secara langsung mencari kemasan obat di apotek, memeriksa label harga, dan mencatat Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tertera pada kemasan untuk kemudian dibandingkan dengan harga jual di apotek.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling penting dalam penelitian, tujuan utama dari pengumpulan data guna memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan

memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶⁸ Dalam pelaksanaan penelitian di Apotek puspa Kecamatan Kaliwates, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, Menurut Sugiyono (2015:308), langkah-langkah dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan cara observasi langsung. Peneliti berperan sebagai pengamat, sehingga interaksi antara peneliti dan subjek penelitian terbatas. Dengan melakukan observasi peneliti mencatat segala sesuatu yang dilihat secara rinci dan menuliskannya sebagai dokumen yang bisa digunakan untuk memperjelas gambaran mengenai objek penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung dengan peran sebagai pengamat pasif, sehingga interaksi antara peneliti dan subjek penelitian bersifat terbatas.

Melalui observasi, peneliti mencatat secara sistematis berbagai peristiwa dan kondisi yang terlihat di lapangan, yang kemudian dijadikan sebagai catatan lapangan untuk memperjelas gambaran mengenai objek penelitian.

Observasi dilakukan di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas jual beli obat generik,

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, 224.

⁶⁹ Nur Ika Mauliyah, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)," *Jurnal Ecoment Global*, 3, no. 1, (Universitas Islam Blitar: 2018): 79, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nur+ika+mauliyah&oq=Nur+#d=gs_qabs&t=1761496265184&u=%23p%3DDWL9kudS1cEJ.

proses pelayanan kepada konsumen, serta cara penyampaian informasi terkait obat yang diperjualbelikan. Peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa terlibat langsung dalam proses transaksi. Dari hasil observasi ini, peneliti memperoleh data mengenai ketersediaan obat generik, pola pelayanan apotek, keterbukaan informasi harga, serta kesesuaian harga jual obat generik dengan ketentuan yang berlaku.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan metode tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam wawancara, peneliti yang bertanya aktif mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang menjawab aktif memberikan tanggapan. Kegiatan wawancara dilakukan berulang kali hingga peneliti mendapatkan semua informasi atau data yang dibutuhkan.⁷⁰

Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pertanyaan terbuka agar informan dapat menjelaskan pendapat dan pemikirannya secara bebas dan mendalam.⁷¹ Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak internal Apotek baik asisten apotek ataupun karyawan lainnya serta konsumen yang datang ke Apotek. Wawancara dilakukan secara langsung dengan

⁷⁰ Nur Ika Mauliyah, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)," *Jurnal Ecoment Global*, 3, no. 1 (Universitas Islam Blitar: 2018): 79, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nur+ika+mauliyah&oq=Nur+#d=gs_qabs&t=1761496265184&u=%23p%3DDWL9kudS1cEJ.

⁷¹ Putra Alif Kurniawan Akbar, Elvin Adria Saputri, Ayu Dwi Yulandari, Rini Puji Astuti, "Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Uin Khas Jember Tentang Edukasi Investasi Saham Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2, no. 3 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2025): 40, DOI: <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.872>.

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai etika bisnis islam dalam penjualan obat generik seperti kejujuran dalam penyampaian informasi, keadilan dalam penetapan harga, transparansi dalam proses transaksi, dan pandangan konsumen terkait harga serta pelayanan. Jawaban dari informan dicatat untuk memastikan akurasi data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Dokumen dapat berupa teks, gambar, atau karya-karya monumental yang dihasilkan oleh seseorang. Seperti dokumen berbentuk teks mencakup catatan harian, riwayat hidup (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.⁷²

Peneliti mengumpulkan dokumen dan bukti pendukung yang relevan dengan penelitian, seperti daftar harga obat generik, foto kemasan obat yang menunjukkan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta dokumentasi visual berupa foto suasana apotek, aktivitas penjualan, dan kondisi vasilitas layanan. Dokumentasi ini berfungsi untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara, serta menjadi bukti nyata dari temuan penelitian di lapangan.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun hasil data secara sistematis dari data yang diperoleh seperti hasil wawancara,

⁷² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*” (Bandung: Alfabeta, 2013), 240 <https://share.google/rv4J3nNknVg4Uaech>.

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yang berarti merupakan suatu proses analisis yang berasal dari data yang terkumpul. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan pencatatan di lapangan, agar menghasilkan data yang akurat.⁷³

Dalam analisis data kualitatif bersifat interaktif dan terjadi terus menerus secara keseluruhan. Kajian tersebut meliputi wawancara terhadap tinjauan etika bisnis dalam praktek jual beli obat generik, dan proses wawancara akan dilanjutkan secara berkesinambungan untuk memperoleh data-data yang diperlukan sesuai dengan pernyataan tersebut di atas. Langkah-langkah analisis datanya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data: Pada langkah ini, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi data: data yang terkumpul kemudian diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan agar sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244-245. <https://share.google/rv4J3nNknVg4Uaech>.

Reduksi data dilakukan dengan cara *pertama*, mengelompokkan informasi berdasarkan dua fokus utama penelitian yaitu penerapan etika bisnis islam dalam praktik jual beli obat generik, dan penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam penetapan harga obat generik. *Kedua*, menghapus data yang tiak relevan dengan tujuan penelitian. *Ketiga*, menyusun data hasil wawancara dan observasi ke dalam bentuk uraian sistematis.

3. Penyajian data: data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan gambar. Penyajian ini mempermudah pembaca memahamitemuan penelitian. Bentuk penyajian meliputi; *pertama*, narasi deskriptif yang meggambarka kondisi nyata di lapangan. *Kedua*, tabel yang berisikan daftar harga obat generic dibandingkan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai peraturan. *Ketiga*, gambar atau foro yang mendukung, seperti dokumentasi kegiatan di Apotek.

4. Kesimpulan dan gambar: adalah apabila seluruh data observasi sesuai dengan kerangka umum survei dan wawancara, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya baik.

F. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan upaya peneliti dalam memastikan data yang ditemukan di lapangan benar dan dapat dipercaya. Memeriksa keabsahan data sangat penting agar hasilnya dapat dipakai dan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Proses pengecekan data dilakukan agar

mendapatkan informasi yang benar dan tepat dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode triangulasi, yaitu memeriksa data dengan cara dan sumber yang berbeda, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu memverifikasi data dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada beberapa sumber yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pengamatan yang lebih lama, yaitu tidak hanya datang ke lokasi penelitian satu atau dua kali, tetapi berkali-kali untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan nyata.⁷⁴

Triangulasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggabungkan beberapa metode dan sumber yang berbeda, seperti dokumen, hasil wawancara, observasi, dan lainnya. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik yang mengumpulkan data dari berbagai sumber. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk mengambil kesimpulan dan mendapatkan persetujuan.⁷⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam berbagai tahap penelitian, peneliti menjelaskan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, termasuk tahap persiapan

⁷⁴ Nikmatul Masruroh, Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2023), vol. 13, no. 2, 358, DOI: 10.37478/als.v13i2.2932.

⁷⁵ Sapto Haryoko, Bahatiar, Fajar Arwadi, Fajar Arwadi, and Bahartiari, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Universiitas Negeri Makassar: 2020), 414. <https://share.google/V4ABmXKqeVwUYXe0K>.

sebelum lapangan, tahap pelaksanaan di lapangan, dan tahap penutupan. Beberapa langkah dalam penelitian tersebut melibatkan.⁷⁶

1. Tahap pra lapangan adalah tahap yang dilalui oleh peneliti sebelum melakukan penelitian di lapangan. Pada tahap ini, peneliti membuat proposal pendek untuk mengusulkan judul penelitian, dosen pembimbing ditugaskan kepada setiap mahasiswa, dan dilakukan konsultasi dengan pembimbing mengenai penyusunan proposal.
2. Tahap pelaksanaan adalah tahap di mana peneliti langsung berada di lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen guna mendapatkan informasi yang diperlukan.
3. Tahap pasca lapangan dilakukan setelah penelitian selesai. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dianalisis dan diproses. Setelah semua tahap penelitian selesai, selanjutnya dilakukan penulisan laporan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁶ Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Perss, 2021), 108, <https://share.google/xyyb4wZrWX0HhjuA3>.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Apotek Puspa

Apotek Puspa merupakan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya jual beli obat. Apotek Puspa merupakan perusahaan perorangan yang didirikan oleh Ibu Suharti selaku pemilik dan pimpinan perusahaan. Apotek Puspa berdiri pada tanggal 21 Novemve 2008 yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.217, Muktisari, Tegal Besar, Kecamatan kaliwates Kabupaten. Lokasi peusahaan cukup strategis karena berada di pusat kota, dekat dengan rumah sakit univesitas muhammadiyah jember (RS Unmu) dan puskesmas, serta berada di area dekat dengan pemukiman penduduk kondisi ini mendukung tingginya aksebilitas dan kemudahan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan apotek.⁷⁷

Apotek Puspa sudah berdiri lebih dari 15 tahun beoperasi, tentunya telah mengalami beberapa kali renovasi untuk memperluas ruang pelayanan dan penambahan kenyamanan konsumen. Pemilik apotek juga telah memperbaharui peralatan dan penambahan ragam produk obat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan Apotek Puspa tidak lepas dari kepercayaan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah konsumen yang datang setiap hari, mulai dari

⁷⁷ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Rabu, 13 Agustus 2025.

pasien rawat jalan, masyarakat umum yang membutuhkan obat bebas, hingga pelanggan tetap yang rutin membeli obat resep.

2. Profil Apotek Puspa

Nama Apotek : Apotek Puspa

Alamat Apotek : Jl. Basuki Rahmat No.217, Muktisari, Tegal Besar,
Kecamatan kaliwates Kabupaten

Pendiri Apotek : Suharti, SST, S.pd,M.Si

Bidang Usaha : Pelayanan jual beli obat kesehatan

Nama APA : Apt. Cicilia Dwi Budi Winarsi, S.Farm.,AAK

3. Visi misi Apotek Puspa

a. Visi

Menjadi Apotek yang amanah dan terpercaya dengan mengedepankan pelayanan yang profesional serta berkualitas demi kepuasan pasien atau konsumen.

b. Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang bermutu dan professional melalui sistem kerja yang efektif dan efisien.
- 2) Menyediakan obat, alat kesehatan serta perbekalan kefarmasian yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menjadikan masyarakat Indonesia yang sehat, khususnya dalam bidang kesehatan jasmani.
- 4) Membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi siapa saja yang bekerja sama dengan kami.

4. Struktur Jabatan di Apotek Puspa

Struktur Jabatan di Apotek Puspa

Sumber: Observasi di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 2025.

5. Tugas dan Wewenang Organisasi

Berikut ini penjelasan tentang tugas dan wewenang masing-masing bagian dari struktur organisasi pada Apotek Puspa yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik Sarana Apotek: Menanggung modal pendirian, mengurus perizinan, memilih Apoteker Pengelolaan Apotek (APA), serta mengawasi keuangan dan kebijakan usaha.
- b. Apoteker Pengelola Apotek (APA): Mengawasi mutu dan ketersediaan obat, menata apotek agar lengkap, menetapkan harga jual bersaing, serta mengembangkan pelayanan yang cepat dan ekonomis.

- c. Asisten Apoteker: Membantu meracik obat, melayani resep dan obat bebas, mencatat stok keluar-masuk, menyusun resep, serta menggantikan apoteker dalam kondisi darurat
- d. Kasir: Mengelola penjualan dan pembayaran, mencatat seluruh transaksi, serta menyusun laporan keuangan harian kepada pimpinan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Penerapan Prinsip kejujuran dan keadilan dalam Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

a. Proses transaksi jual beli

Proses jual beli adalah langkah pertama yang krusial dalam praktik penjualan obat generik di Apotek Puspa, karena pada fase ini terjadi hubungan langsung antara apotek dan pelanggan. Proses ini tidak hanya mencakup pengiriman obat serta pembayaran, tetapi juga melibatkan penyampaian informasi tentang obat, penentuan harga, serta sikap dan pelayanan dari petugas apotek kepada pelanggan. Maka dari itu, proses ini berfungsi sebagai tolok ukur awal untuk menilai penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam praktik penjualan obat generik. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan staf Apotek Puspa, diperoleh penjelasan tentang langkah-langkah dalam proses pembelian dan penjualan obat generik yang diterapkan di Apotek Puspa. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan petugas apotek mengenai prosedur transaksi obat generik.

Harga obat diinformasikan dengan jelas sebelum transaksi, pernyataan ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan ibu Fildatul Hasanah selaku Asisten Apoteker di Apotek Puspa:

“biasanya sebelum meracik obat, saya tanya dulu dengan pembeli, mau ditebus semuanya atau separuh. Kalau semuanya, harga sekian, kalau separuh, harga sekian. Setelah itu barulah saya siapkan obatnya sesuai permintaan.”⁷⁸

Pada Pernyataan ini diungkapkan bahwa dalam kegiatan membeli dan menjual obat generik di Apotek Puspa, interaksi dilakukan secara langsung antara apotek, baik dengan asisten apoteker maupun karyawan kasir, dan konsumen. Pada pembelian obat resep, pembeli menyerahkan resep dari dokter yang akan cek terlebih dahulu. Setelah itu, apoteker atau asisten apoteker mempersiapkan obat sesuai dengan dosis yang tertera di resep. Transaksi ini dilakukan dengan transparansi mengenai harga sebelum proses selesai. Sebelum obat disediakan, pegawai apotek akan menanyakan kepada konsumen apakah obat tersebut akan ditebus secara keseluruhan atau sebagian. Pada tahap ini, harga obat akan diinformasikan dengan jelas sesuai dengan jumlah yang akan dibeli. Dengan cara ini, konsumen diberikan kebebasan untuk memilih jumlah obat yang akan ditebus, sehingga konsumen dapat menyesuaikan kebutuhan pengobatan dengan kondisi keuangan yang dimiliki.

Hal ini juga ditegaskan oleh pegawai kasir Apotek Puspa dengan Ibu Sri Setiarti:

⁷⁸ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Rabu, 13 Agustus 2025.

“biasanya saya akan mengecek dulu ketersediaan obatnya ada atau tidak, setelah itu saya memberitahukan harganya, jika pembeli setuju dengan harga tersebut maka dilanjutkan transaksi pembayaran.”⁷⁹

Pada Pernyataan ini diungkapkan bahwa dalam proses jual beli, karyawan kasir akan terlebih dahulu memeriksa ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh konsumen. Setelah memastikan ketersediaan obat ada, kasir akan memberikan informasi mengenai harga obat kepada konsumen. Jika konsumen sudah mengetahui dan menyetujui harga obat, maka transaksi kemudian dilanjutkan pada tahap pembayaran. Proses ini mencerminkan adanya persetujuan antara apotek dan konsumen sebelum transaksi selesai.

Kemudahan dalam proses transaksi dan keterbukaan informasi harga obat ditegaskan oleh Ibu Ayu selaku pelanggan di Apotek Puspa, “Beli obat disini nyaman banget mbak, kasirnya ngejelasin harga dan cara pakai obatnya, jadi saya bisa atur uang saya. Saya beli separuh resep dulu, semua jelas, dan pelayanannya ramah banget.”

Berdasarkan pengalaman pelanggan, dalam setiap transaksi penjualan obat di Apotek Puspa, apotek selalu menjelaskan tentang harga obat dan cara penggunaan obat yang dibeli. Selain itu, pelanggan juga diberikan opsi untuk memilih apakah obat akan ditebus seluruhnya atau hanya sebagian. Ketika pilihan ini diungkapkan, harga obat akan dijelaskan dengan jelas sesuai jumlah yang dibeli. Keterbukaan dalam

⁷⁹ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Peneliti, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

informasi ini membantu pelanggan menyesuaikan kebutuhan pembelian obat dengan situasi keuangannya, sehingga pelanggan merasa lebih tenang saat bertransaksi.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses pembelian obat generik di Apotek Puspa berjalan secara rapi, jelas, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Setiap tahap dalam transaksi dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan dan kejelasan untuk para konsumen, mulai dari pemeriksaan resep, penjelasan mengenai harga, hingga pembayaran dan penerimaan obat. Karyawan apotek selalu memberi informasi mengenai harga sebelum proses transaksi dimulai dan memberi pilihan kepada konsumen dalam mengambil keputusan membeli jumlah obat yang akan ditebus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Dengan demikian proses jual beli obat generik di Apotek Puspa dijalankan dengan transparan, hal ini menunjukkan bahwa Apotek Puspa telah menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam proses jual beli, sehingga konsumen merasa aman, dihargai, dan puas dengan pelayanan yang diberikan.

b. Pelayanan terhadap konsumen

Pelayanan kepada pelanggan adalah elemen yang sangat penting dalam transaksi pembelian obat generik di apotek. Dalam pelaksanaannya, pelayanan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan kebutuhan obat, tetapi juga melibatkan cara interaksi antara karyawan apotek dengan konsumen yang terjadi selama transaksi. Metode yang digunakan oleh karyawan

dalam melayani konsumen bisa mencerminkan pola pelayanan yang diterapkan dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan kepada konsumen dilaksanakan di Apotek Puspa, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan narasumber penelitian. Pada bagian ini, penyajian data difokuskan pada pengalaman dan penjelasan dari narasumber mengenai pelayanan yang diterima dan diberikan selama proses pembelian obat generik di Apotek Puspa.

Keramahan dalam pelayanan terhadap konsumen ditegaskan oleh oleh ibu Halimah selaku konsumen di Apotek Puspa, “Pelayanan di apotek sini baik mbak, walaupun kadang ramai pembeli tetapi mereka tetap senyum dan menjawab pertanyaan saya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Halimah sebagai konsumen, pelayanan di Apotek Puspa digambarkan berlangsung dengan sikap baik dari staf apotek. Walaupun keadaan apotek sedang ramai dikunjungi pembeli, staf tetap menunjukkan perilaku yang sopan, tersenyum, dan melayani pelanggan dengan penuh perhatian. Dalam situasi ini, karyawan apotek tetap memberikan tanggapan terhadap pertanyaan konsumen tanpa menunjukkan sikap terburu-buru atau mengabaikan konsumen. Hal Ini menunjukkan bahwa sikap ramah selalu dijaga meskipun kegiatan pelayanan cukup padat, sehingga konsumen merasa dihargai dan nyaman saat berada di apotek.

Apotek Puspa memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyingkapi konsumen yang tidak mampu membeli obat atau ketika stok obat tidak tersedia, narasumber dari Sri Setiarti selaku karyawan dibidang kasir:

“apabila ada pembeli yang tidak mampu membayar obat yang akan dibeli, kami akan menawarkan obat dengan merek lain dengan manfaat yang sama dan harga yang lebih terjangkau. Contohnya; obat generik Amoxan harga Rp.9.000 sedangkan Amoxicilin harga Rp.5.000, kedua obat tersebut memiliki manfaat yang sama untuk mengobati infeksi bakteri, namun memiliki harga yang berbeda.”⁸⁰

Pada pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sri Setiarti sebagai kasir Apotek Puspa menegaskan bahwa pelayanan di Apotek Puspa juga tampak dari cara karyawan menangani situasi konsumen, terutama saat konsumen mengalami masalah dalam melakukan pembayaran atau ketika obat yang diperlukan tidak tersedia. Dalam kondisi ini, karyawan kasir tidak buru-buru menolak atau menghentikan proses transaksi, melainkan berusaha memberikan penjelasan dan menawarkan obat alternatif lain yang memiliki manfaat serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Karyawan kasir menjelaskan perbedaan harga dan jenis obat kepada konsumen dengan tujuan agar konsumen tetap dapat memperoleh obat sesuai kebutuhannya. Dengan cara tersebut, konsumen tetap dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembelian, meskipun terdapat keterbatasan kemampuan ekonomi atau ketersediaan obat di apotek.

⁸⁰ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Selain pelayanan yang baik di Apotek Puspa tidak hanya terlihat dari sikap ramah yang ditunjukkan oleh para karyawan, tetapi juga dari perlakuan yang adil dan setara terhadap semua konsumen, tanpa memperhatikan status sosial atau kemampuan ekonomi mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Fildatul Hasanah, seorang asisten apoteker di Apotek Puspa.

"Ya, kami memang melayani semua pembeli secara sama. Baik mereka yang membeli obat mahal maupun obat generik, kami tetap menjelaskan dengan sopan dan jelas. Di apotek sini memang menerapkan 5S mbak yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun biar pembeli juga nyaman dan puas dengan pelayanan kami."⁸¹

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Fildatul Hasanah selaku asisten apoteker, pelayanan terhadap konsumen di Apotek Puspa dilakukan secara adil dan tidak membedakan konsumen berdasarkan jenis obat yang dibeli. Baik konsumen yang membeli obat bermerek dengan harga relatif mahal maupun konsumen yang membeli obat generik dengan harga terjangkau tetap mendapatkan perlakuan yang sama. Dalam pelaksanaannya, karyawan apotek memberikan penjelasan tentang obat dengan bahasa yang ramah dan mudah dipahami oleh pelanggan. Selain itu, sikap layanan yang diperlihatkan oleh petugas apotek mengikuti prinsip 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Penerapan prinsip ini menjadi bagian dari rutinitas pelayanan sehari-hari di Apotek Puspa, yang diharapkan dapat menciptakan

⁸¹ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

kenyamanan dan kepuasan bagi konsumen sepanjang proses pelayanan berlangsung.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelayanan di Apotek Puspa sangat menekankan sikap ramah, komunikasi yang terbuka, serta perlakuan adil kepada setiap pelanggan. Pelayanan tidak hanya dinilai dari sikap dan cara berbicara, tetapi juga dari upaya yang dilakukan untuk membantu konsumen yang mengalami keberatan terhadap harga obat maka kaaryawan apotek akan menawarkan alternatif obat sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial pelanggan. Hal ini menunjukkan perilaku apotek puspa yang perhatian, jujur, dan peduli pada kondisi ekonomi konsumen. Selain itu, Apotek Puspa menerapkan prinsip 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, sehingga menciptakan suasana pelayanan yang hangat dan ramah. Pelayanan yang penuh etika ini menunjukkan bahwa Apotek Puspa tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dan rasa peduli terhadap kesehatan konsumen.

c. Keterbukaan informasi

Keterbukaan informasi adalah hal yang sangat penting dalam proses jual beli obat generik di apotek, karena informasi yang diterima konsumen berhubungan langsung dengan keputusan mereka dalam membeli dan menggunakan obat. Dalam layanan sehari-hari, keterbukaan informasi dapat dilihat dari cara petugas apotek memberikan penjelasan tentang obat, termasuk harga, manfaat, petunjuk penggunaan, efek

samping, serta informasi lainnya yang diperlukan oleh konsumen. Tujuan dari hal ini adalah agar konsumen memahami obat yang mereka beli dan memiliki kemampuan untuk memilih obat yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansialnya. Untuk memahami bagaimana keterbukaan informasi diterapkan dalam jual beli obat generik di Apotek Puspa, peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan konsumen dan karyawan apotek.

Adanya transparansi informasi harga dan efek samping obat kepada konsumen, hal ini ditegaskan oleh bapak matnul selaku pelanggan di Apotek puspa:

“Saya senang membeli obat di Apotek Puspa karena pelayanannya terbuka. Kalau saya bertanya mengenai harga atau efek samping obat, jawabannya selalu jelas dan mudah dipahami. Sering kali, karyawan Apotek juga menyarankan opsi obat lain yang lebih murah namun memiliki fungsi yang sama. Jadi, saya merasa tidak dirugikan atau dibohongi.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Matnul selaku konsumen, keterbukaan informasi di Apotek Puspa dirasakan melalui penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai harga serta efek samping obat. Konsumen tidak hanya menerima informasi secara sepihak, tetapi juga diberikan ruang untuk bertanya dan memperoleh penjelasan tambahan sesuai dengan kebutuhannya.

⁸² Matnul, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Selain itu, konsumen juga mendapatkan informasi mengenai alternatif obat lain yang memiliki fungsi serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Hal tersebut membuat konsumen merasa lebih yakin dalam mengambil keputusan pembelian dan menumbuhkan rasa percaya bahwa pihak apotek tidak menyembunyikan informasi yang dapat merugikan konsumen.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Cindy, salah satu konsumen di Apotek Puspa, yang mengatakan:

“Saya suka beli obat di Apotek Puspa karena penjelasannya cukup jelas. Memang mereka tidak selalu menjelaskan efek sampingnya secara rinci, tapi kalau saya tanya soal obatnya, pasti dijawab dengan sabar. Jadi tetap enak dan jelas kalau mau bertanya.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cindy menunjukkan bahwa keterbukaan informasi di Apotek Puspa tidak selalu disampaikan secara rinci sejak awal, namun tetap terbuka ketika konsumen mengajukan pertanyaan. Dalam praktiknya, petugas apotek memberikan penjelasan dasar mengenai obat yang dibeli, dan apabila konsumen ingin mengetahui informasi lebih lanjut, petugas bersedia menjelaskan dengan sabar dan jelas. Kondisi tersebut memberikan kenyamanan bagi konsumen, karena meskipun tidak semua informasi disampaikan secara detail di awal, konsumen tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh penjelasan yang dibutuhkan tanpa merasa diabaikan.

⁸³ Cindy, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Sementara itu, hasil wawancara dengan Ibu Fildatul Hasanah, yang menjabat sebagai Asisten Apoteker, menunjukkan bahwa penjelasan tentang obat disesuaikan dengan kebutuhan pembeli:

“Biasanya kami menjelaskan aturan penggunaan dan manfaat obatnya terlebih dahulu. Kalau pembeli menanyakan lebih lanjut, baru kami jelaskan efek sampingnya secara terbuka. Jadi tidak semua dijelaskan secara rinci di awal, tapi tetap kami sampaikan kalau ada yang ingin tahu lebih dalam.”⁸⁴

Ibu Fildatul Hasanah selaku Asisten Apoteker menjelaskan bahwa pemberian informasi obat di Apotek Puspa disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman konsumen. Pada umumnya, petugas terlebih dahulu menjelaskan aturan penggunaan dan manfaat obat yang dibeli. Apabila konsumen mengajukan pertanyaan lebih lanjut, terutama terkait efek samping obat, maka informasi tersebut disampaikan secara terbuka dan jelas. Cara penyampaian informasi ini menunjukkan bahwa apotek tetap memberikan kesempatan untuk bertanya, meskipun tidak semua penjelasan diberikan dengan detail di awal transaksi.

Selain itu, Ibu Sri Setiarti, pegawai kasir Apotek Puspa, juga menambahkan:

“Di apotek kami, setiap karyawan wajib memberikan penjelasan terkait produk yang dibeli oleh konsumen hingga konsumen benar-benar memahami manfaat dan efek sampingnya. Selain itu, bila ada konsumen yang bertanya mengenai informasi terkait obat tertentu, kami juga memberikan penjelasan mengenai indikasi penggunaannya agar tidak terjadi kesalahpahaman.”⁸⁵

⁸⁴ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

⁸⁵ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Penjelasan mengenai keterbukaan harga ditegaskan oleh ibu setiarti selaku karyawan di Apotek Puspa, “Sebelum transaksi selesai, biasanya saya jelaskan dulu jenis obat dan harganya. Kalau ada obat pengganti atau yang lebih murah tapi khasiatnya sama, juga saya beri tahu agar pembeli bisa memilih.”

Pernyataan dari ibu sri setiarti menunjukkan bahwa keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari prosedur pelayanan di Apotek Puspa. Setiap karyawan diwajibkan memberikan penjelasan mengenai produk yang dibeli oleh konsumen hingga konsumen memahami manfaat dan efek samping obat tersebut. Selain itu, jika ada konsumen menanyakan informasi lebih lanjut mengenai obat tertentu, karyawan kasir juga memberikan penjelasan mengenai indikasi penggunaan obat guna menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan obat.

Dalam transparansi informasi harga di apotek puspa informasi harga diberitahu sebelum transaksi selesai, dengan menjelaskan jenis obat dan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Apabila terdapat pilihan obat pengganti atau obat dengan harga yang lebih terjangkau namun memiliki khasiat yang sama, informasi tersebut juga disampaikan kepada konsumen agar konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhannya.

Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa Apotek Puspa sudah menerapkan sikap terbuka dalam memberikan informasi. Pegawai apotek selalu memberikan penjelasan yang jujur dan mudah

dipahami, terutama terkait manfaat, aturan pakai, serta harga obat. Meskipun efek samping obat tidak selalu dijelaskan secara rinci di awal, namun jika konsumen bertanya, petugas akan menjelaskan secara terbuka dan ramah. Selain itu, keterbukaan informasi dapat dilihat dari karyawan apotek yang memberikan alternatif obat lain yang memiliki manfaat yang sama dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atau dipaksa membeli obat tertentu. Adanya keterbukaan informasi ini telah memberikan rasa aman, kepercayaan konsumen semakin meningkat, dan menghindari adanya kecurangan dalam transaksi jual beli obat generik. Hal ini menunjukkan sikap transparansi dan tanggung jawab terhadap konsumen, sesuai dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam etika bisnis Islam.

d. Transaksi yang sesuai prosedur

Dalam praktik jual beli obat di apotek, proses transaksi tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penyerahan obat dan pembayaran, tetapi juga mencakup serangkaian prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak apotek. Prosedur tersebut meliputi pemeriksaan jenis obat, kejelasan persyaratan pembelian, hingga tahapan penyerahan obat kepada konsumen.

Di Apotek Puspa, transaksi jual beli obat generik dilakukan melalui alur pelayanan yang telah ditetapkan, khususnya dalam membedakan antara obat resep dan obat nonresep. Penerapan prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan kefarmasian serta menjamin keamanan dan ketepatan

penggunaannya. Oleh karena itu, peneliti mengkaji bagaimana prosedur transaksi tersebut dijalankan berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan apotek dan konsumen.

Pernyataan transaksi yang sesuai prosedur ditegaskan oleh ibu Fildatun Hasanah selaku asisten apoteker di Apotek Puspa:

“kalau ada pembeli datang, biasanya kami Tanya dulu mau beli obat apa. Kalau obatnya wajib resep, kami minta resep dokter dulu untuk diperiksa. Setelah itu kami ambil obat dari stok, cek tanggal kadaluwarsa dari kondisi kemasan. Sebelum menyerahkan obat, kami sampaikan harga dan aturan pakainya. Setelah pembeli setuju. Baru melakukan pembayaran dan diberikan nota. Semua prosedur ini kami jalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk tidak menjual obat resep tanpa resep dokter.”⁸⁶

Dalam kesesuaian prosedur transaksi dijelaskan bawah proses membeli obat di Apotek Puspa dilakukan lewat beberapa langkah yang sudah ditentukan. Untuk obat yang membutuhkan resep, pegawai tidak akan memberikan obat jika konsumen tidak membawa resep dokter. Setelah resep diperiksa, obat diambil dari stok dengan memperhatikan kondisi kemasan dan tanggal kadaluwarsa. Sebelum diserahkan kepada konsumen, harga obat dijelaskan secara transparan dan aturan pakainya diterangkan terlebih dahulu. Setelah konsumen menyetujui, barulah pembayaran dilakukan, nota diberikan, dan obat diserahkan. Prosedur ini dijalankan secara konsisten agar seluruh transaksi berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.

⁸⁶ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Sri Setiarti, sebagai pegawai kasir Apotek Puspa, yang menjelaskan:

“Biasanya, kalau obatnya memerlukan resep, saya pastikan terlebih dahulu kepada apoteker sebelum transaksi dilakukan. Jika obatnya nonresep, saya tetap memberi tahu harga dan jumlahnya kepada konsumen agar jelas. Setelah disetujui, saya masukkan ke sistem dan memberikan nota. Semua proses ini sudah ada aturannya dari apotek.”⁸⁷

Kepatuhan terhadap prosedur transaksi juga ditegaskan oleh ibu sri setiarti dalam hal penjualan obat yang memerlukan resep dokter, kasir memastikan terlebih dahulu kepada apoteker sebelum transaksi dilakukan. Untuk obat nonresep, kasir tetap menyampaikan informasi mengenai harga dan jumlah obat kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah konsumen menyetujui transaksi, data penjualan dimasukkan ke dalam sistem dan kasir memberikan nota sebagai bukti pembayaran. Proses tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan berdasarkan aturan internal apotek yang telah ditetapkan.

Selain dari pihak apotek, Ibu Yuni, yang merupakan pelanggan Apotek Puspa, juga memberikan tanggapannya:

“Saya sering beli obat di sini, dan memang pelayanannya terstruktur dan rapi. Pernah saya mau beli obat yang memerlukan resep, tapi waktu itu tidak membawa resep, jadi obatnya tidak diberikan. Mereka tetap sopan dan menjelaskan bahwa harus ada resep dokter. Menurut saya itu bagus, karena berarti mereka mematuhi aturan.”⁸⁸

⁸⁷ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

⁸⁸ Yuni, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Berdasarkan pengalaman konsumen, proses transaksi di Apotek Puspa berjalan secara terstruktur dan tertib. Konsumen melihat bahwa pihak apotek tidak hanya melayani penjualan obat, tetapi juga mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya terkait penjualan obat yang memerlukan resep dokter. Dalam salah satu pengalaman yang disampaikan, ketika konsumen tidak membawa resep dokter, pihak apotek tidak memberikan obat tersebut dan tetap memberikan penjelasan dengan sikap yang sopan. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur penjualan obat diterapkan secara konsisten, meskipun berpotensi mengurangi penjualan, demi mematuhi aturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa transaksi pembelian dan penjualan obat di Apotek Puspa telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap tahapan dalam transaksi dijalankan dengan teliti dan bertanggung jawab, mulai dari proses pemeriksaan resep, pengujian kondisi obat, penjelasan harga, hingga pemberian struk pembelian kepada pelanggan. Apotek Puspa juga menegaskan komitmen untuk tidak menjual obat resep tanpa adanya resep dokter, sebagai bentuk penaatan terhadap peraturan serta etika yang berlaku dalam profesi apoteker. Konsistensi dalam menerapkan prosedur tersebut mencerminkan adanya nilai-nilai kejujuran, kewaspadaan, dan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

2. Penerapan Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Penetapan Harga Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

a. Kebijakan penetapan harga obat generik

Kebijakan penetapan harga obat generik merupakan salah satu aspek penting dalam praktik jual beli di apotek karena berkaitan dengan keterjangkauan obat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penetapan harga obat generik tidak dapat dilakukan secara bebas. Penetapan harga tidak dilakukan secara bebas, melainkan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pihak apotek tidak dapat menetapkan harga di luar ketentuan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, harga obat generik telah ditetapkan secara tetap dalam sistem apotek. Petugas kasir hanya menyampaikan harga yang telah tercantum tanpa melakukan perubahan secara sepihak.

Kondisi ini mencerminkan adanya konsistensi dalam penerapan kebijakan harga serta meminimalkan potensi terjadinya perbedaan harga antar konsumen.

Pernyataan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Ibu Fildatul Hasanah, Asisten Apoteker di Apotek Puspa, yang menjelaskan:

“Di apotek ini, kami hanya menjual obat yang memiliki surat edaran resmi dari BPOM dan terdaftar di Kementerian Kesehatan. Untuk obat generik, kami mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh HET, jadi tidak bisa kami naikkan semauanya.”⁸⁹

⁸⁹ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga obat generik di Apotek Puspa dilakukan dengan mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku. Obat generik yang dijual telah memiliki izin edar dan terdaftar secara sah, sehingga harga yang ditetapkan tidak bersifat bebas. Penggunaan Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi acuan utama dalam menentukan harga jual obat generik di apotek puspa.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan keterangan Ibu Sri Setiarti, karyawan kasir Apotek Puspa, yang mengungkapkan:

“Harga obat generik di sini sudah ditentukan secara tetap oleh apotek. Saat pembeli menanyakan harga, kami hanya perlu melihat dari sistem. Harga tersebut sudah sesuai dengan HET dan tidak bisa kami ubah sendiri.”⁹⁰

Pernyataan ini menggambarkan bahwa harga obat generik telah ditetapkan secara sistematis dan tercantum dalam sistem apotek. Petugas kasir tidak memiliki kewenangan untuk mengubah harga, melainkan hanya menyampaikan harga yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dan kepastian harga dalam praktik jual beli obat generik di Apotek Puspa.

Di sisi lain, Ibu Rani, seorang konsumen Apotek Puspa, menyampaikan kesan positif terhadap kebijakan harga yang diterapkan:

“Saya beberap kali membeli obat generik di sini karena harganya terjangkau dan tidak jauh berbeda dari apotek lain. Kasir juga selalu memberi tahu harga sebelum saya bayar, jadi saya merasa tenang dan tidak takut dibohongi.”⁹¹

⁹⁰ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

⁹¹ Rani, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 16 Agustus 2025.

Keterangan dari konsumen menunjukkan bahwa kebijakan harga obat generik di Apotek Puspa dinilai terjangkau dan tidak jauh berbeda dengan apotek lain. Selain itu, penyampaian informasi harga sebelum pembayaran memberikan rasa aman bagi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan dalam proses transaksi.

Dalam kebijakan penjualan obat, Apotek Puspa hanya menjual obat yang memiliki izin edar resmi dari BPOM dan mengikuti ketentuan HET pemerintah untuk obat generik. Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten apoteker dan karyawan kasir, harga obat yang diterapkan di Apotek Puspa selalu berada di bawah atau sama dengan HET.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber informasi, terdapat sekitar 15 jenis obat generik yang sering dibeli oleh masyarakat di Apotek Puspa. Jenis obat tersebut menjadi fokus dalam penyajian data harga obat generik. Data harga dari obat-obat tersebut didapatkan melalui dokumen, yaitu daftar harga resmi yang diberikan oleh Apotek Puspa saat wawancara. Berikut ini daftar harga obat generik di apotek Puspa:

Tabel 4.1
Daftar Harga Obat Generik di Apotek Puspa

DAFTAR HARGA OBAT GENERIK DI APOTEK PUSPA			
NO	NAMA OBAT GENERIK	HET (Harga Eceran Tertinggi)	HJA (Harga Jual Apotek)
1	Amoxicillin 500mg	Rp 15.300	Rp 6.500
2	Asam mefenamat 500mg	Rp 7.411	Rp 4.000
3	Ibuprofen 400mg	Rp 6.400	Rp 5.000
4	Methylprednisolon 8mg	Rp 7.550	Rp 7.000

5	Ketokonazol 400mg	Rp 6.400	Rp 6.000
6	Allopurinol 300mg	Rp 8.100	Rp 7.500
7	Paracetamol 500mg	Rp 4.175	Rp 4.000
8	Simvastatin 20mg	Rp 6.370	Rp 6.000
9	Piroxicam 10mg	Rp 3.784	Rp 3.000
10	Cefixime 200mg	Rp 50.900	Rp 28.000
11	Amlodipine 10mg	Rp 6.200	Rp 5.500
12	Cetirizine 10mg	Rp 12.000	Rp 4.000
13	Acetylsisteine 200mg	Rp 22.900	Rp 6.000
14	Zinc Sulfate 20mg	Rp 15.000	Rp 6.000
15	betahistine 6mg	Rp 8.300	Rp 6.500

Sumber: Dokumentasi Apotek Puspa kecamatan kaliwates kabupaten jember, 2025, diolah oleh peneliti.⁹²

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penetapan harga obat generik di Apotek Puspa dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apotek hanya menjual obat yang memiliki izin edar resmi dari BPOM dan terdaftar di Kementerian Kesehatan, serta mematuhi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Karyawan apotek juga menjalankan kebijakan harga secara jujur tanpa melakukan perubahan harga secara sembarangan. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam bisnis, sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

b. Margin keuntungan

Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Ibu Fildatun Hasanah, seorang asisten apoteker di Apotek Puspa, yang menjelaskan:

⁹² Dokumentasi di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, (13 Agustus 2025), diolah oleh peneliti.

“Apotek Puspa menggunakan margin keuntungan sebesar 15% untuk semua jenis obat, seperti paracetamol. Harga HET-nya sekitar Rp4.100, jadi dengan margin 15% dari harga beli, harga jual di apotek bisa mencapai Rp4.000. Harga ini jelas masih di bawah HET, jadi tidak melanggar aturan. Jika apotek mengambil keuntungan hingga 40%, selama harga jual tetap di bawah HET, itu tidak masalah. Namun di sini kami memilih margin 15% agar harga tetap terjangkau bagi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan.”⁹³

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh karyawan bagian kasir, Ibu Sri Setiarti, yang menjelaskan bahwa apotek selalu memperhatikan batas HET sebelum menentukan harga jual:

“Kami selalu memastikan harga yang dimasukkan ke dalam sistem kasir sesuai dengan batas HET. Jadi, meskipun ada margin keuntungan, harga jual tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur pemerintah. Tujuannya agar harga tetap adil dan tidak memberatkan pembeli.”⁹⁴

Sementara itu, dari sudut pandang konsumen, Mbak Ajeng menjelaskan bahwa harga obat di Apotek Puspa tergolong lebih terjangkau dibandingkan beberapa apotek lain di sekitar wilayah Kaliwates:

“Saya biasa membeli obat di Apotek Puspa karena harganya lebih murah dibandingkan apotek lain, padahal kualitasnya sama. Pernah saya bandingkan harga paracetamol di tempat lain yang lebih mahal, tetapi di sini masih di bawah harga yang tertera pada kemasan.”⁹⁵

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Mbak Wulan, salah satu pelanggan tetap Apotek Puspa:

⁹³ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

⁹⁴ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

⁹⁵ Ajeng, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 16 Agustus 2025.

“Saya lebih suka membeli di sini karena harganya stabil dan tidak pernah berubah signifikan. Kadang di tempat lain harganya naik sedikit, tetapi di Apotek Puspa tetap sama, jadi saya percaya mereka tidak mengambil keuntungan berlebihan.”⁹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Apotek Puspa menerapkan margin keuntungan secara wajar, yakni sebesar 15% dari harga beli obat. Meskipun margin ini berlaku untuk semua jenis obat, apotek tetap memperhatikan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) agar harga jual tidak melebihi batas yang ditetapkan pemerintah. Dengan kebijakan ini, Apotek Puspa menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam menentukan harga, yaitu dengan tidak membebankan konsumen serta menjaga transparansi dan kepercayaan dalam setiap transaksi.

c. Transparansi informasi produk, kualitas, dan harga

Dalam proses penjualan obat generik, apotek menerapkan prinsip transparansi sebagai wujud kejujuran dalam setiap transaksi. Harga obat selalu diberitahukan secara jelas kepada konsumen sebelum dilakukan pembayaran. Meskipun tidak ada daftar harga yang dipajang di etalase atau papan informasi, petugas tetap memberikan informasi mengenai harga secara langsung kepada konsumen, sehingga konsumen tahu berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan tanpa ada yang disembunyikan. Jika terdapat dua jenis obat yang memiliki manfaat yang sama tetapi memiliki harga yang berbeda, karyawan apotek menjelaskan bahwa perbedaan tersebut biasanya disebabkan oleh merek atau

⁹⁶ Wulan, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

produsen, bukan karena perbedaan khasiat obat. Penjelasan ini membuat proses transaksi lebih terbuka dan mengurangi kemungkinan adanya kecurangan dalam harga maupun informasi produk. Dengan penjelasan ini, konsumen dapat memilih obat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

Konsumen juga menerima bukti pembayaran berupa struk setelah membeli obat. Pemberian struk ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dalam proses transaksi, karena konsumen dapat melihat secara jelas rincian harga yang sesuai dengan informasi yang telah diberikan sebelumnya. Dengan adanya struk, konsumen merasa lebih tenang dan percaya bahwa harga yang dikenakan tidak ada yang dimanipulasi saat proses pembayaran. Selain harga, Kualitas obat dijelaskan secara jelas bahwa semua obat generik yang dijual telah terdaftar secara resmi dan aman untuk dikonsumsi.

Pernyataan transparansi harga obat kepada konsumen ditegaskan oleh Ibu Sri Setiarti, sebagai karyawan di bagian kasir di Apotek Puspa, yang menjelaskan bahwa apotek selalu menjaga transparansi harga dan informasi obat:

“Setiap kali melakukan transaksi, saya selalu menyebutkan harga sebelum proses pembayaran. Jika konsumen bertanya mengapa ada dua jenis obat dengan harga berbeda meskipun khasiatnya sama, saya menjelaskan perbedaan merek dan kualitasnya. Dengan demikian, pembeli dapat memilih sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.”⁹⁷

⁹⁷ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa transparansi harga diterapkan secara konsisten dalam setiap proses transaksi. Penyebutan harga sebelum pembayaran serta penjelasan mengenai perbedaan harga antara obat dengan khasiat yang sama memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai pilihan produk yang tersedia. Dengan adanya penjelasan mengenai perbedaan merek dan kualitas, konsumen diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri obat yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

Hal serupa juga ditegaskan oleh ibu Fildatul Hasanah, selaku Asisten Apoteker di Apotek Puspa, “Untuk harga obat generik disini memang tidak dicantumkan list harga pada etalase atau papan informasi, tapi kami memberitahu harga secara langsung pada konsumen.” Selain itu, transparansi kualitas produk juga diungkapkan oleh ibu Fildatul Hasanah, selaku Asisten Apoteker di Apotek Puspa bahwa, “Untuk kualitas produk, kami menjelaskan bahwa obat generik tetap aman karena sudah sesuai standar pemerintah. hanya saja kadang mereknya berbeda sehingga harganya berbeda.”

Penjelasan ini menggambarkan bahwa meskipun Apotek Puspa tidak mencantumkan daftar harga secara tertulis pada etalase, informasi harga tetap disampaikan secara langsung kepada konsumen. Selain itu, transparansi kualitas produk juga diwujudkan melalui penjelasan bahwa obat generik yang dijual telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan aman untuk dikonsumsi. Perbedaan harga dijelaskan

sebagai akibat dari perbedaan merek, bukan perbedaan khasiat, sehingga konsumen memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kualitas produk yang dibeli.

Dari sudut pandang konsumen, Mas Agus sebagai pelanggan Apotek Puspa juga memberikan penilaian positif terhadap tingkat transparansi informasi yang diberikan:

“karyawan apotek menjelaskan terkait obat yang saya beli, baik khasiatnya apa dan cara penggunaannya seperti apa. Untuk kualitas obatnya baik, saya pernah membandingkan dengan merek lain, hasilnya sama saja. Obat generik disini juga selalu dalam kondisi baik dan tidak pernah kadaluarsa.”⁹⁸

Keterangan konsumen menunjukkan bahwa transparansi informasi yang diberikan oleh pihak apotek mencakup penjelasan mengenai khasiat obat, cara penggunaan, serta kondisi kualitas obat. Pengalaman konsumen yang pernah membandingkan obat generik dengan merek lain menunjukkan bahwa obat generik yang dijual memiliki kualitas yang setara. Selain itu, kondisi obat yang baik dan tidak kadaluarsa turut memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan.

Hal yang serupa juga ditegaskan oleh mbak Wulan Mbak Wulan, salah satu pelanggan tetap Apotek Puspa:

“Harga di sini jelas, karena sebelum bayar pasti disebutkan dulu. Kalau saya tanya apa ada obat lain, Saya sering ditawari obat yang lebih murah sama mbak apoteknya. Jadi saya merasa kalo karyawan apoteknya selalu jujur.”⁹⁹

⁹⁸ Agus, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 16 Agustus 2025.

⁹⁹ Wulan, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

Keterangan konsumen menunjukkan bahwa transparansi informasi yang diberikan oleh pihak apotek mencakup penjelasan mengenai khasiat obat, cara penggunaan, serta kondisi kualitas obat. Pengalaman konsumen yang pernah membandingkan obat generik dengan merek lain menunjukkan bahwa obat generik yang dijual memiliki kualitas yang setara. Selain itu, kondisi obat yang baik dan tidak kedaluwarsa turut memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa meskipun Apotek Puspa tidak mencantumkan daftar harga secara tertulis pada etalase, informasi harga tetap disampaikan secara langsung kepada konsumen. Transparansi kualitas produk juga diwujudkan melalui penjelasan bahwa obat generik yang dijual telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan aman untuk dikonsumsi. Perbedaan harga dijelaskan sebagai akibat dari perbedaan merek, pabrik, atau kualitas kemasan, bukan karena perbedaan khasiat obat, sehingga konsumen memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kualitas produk yang dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Apotek Puspa telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik, khususnya dalam penyampaian informasi harga dan kualitas obat generik kepada konsumen. Transparansi harga di Apotek Puspa disampaikan secara lisan, bukan melalui daftar harga yang dipublikasikan secara tertulis. Meskipun demikian, konsumen tetap dapat memperoleh

informasi yang jelas melalui proses tanya jawab dengan karyawan apotek terkait perbedaan harga antar merek obat generik yang tersedia.

Selain itu, konsumen juga menerima bukti pembayaran berupa struk. Hal ini merupakan bentuk transparansi bahwa harga obat yang tercantum sesuai dengan informasi yang diberikan sebelum transaksi. Dengan adanya struk tersebut, konsumen merasa lebih aman karena tidak ada unsur manipulasi harga. Dengan demikian, prinsip shidq (kejujuran) dan amanah (tidak menipu) tetap terpenuhi, meskipun informasi disampaikan secara lisan. Dengan sikap transparan ini, Apotek Puspa berhasil membangun kepercayaan serta loyalitas pelanggan, serta menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam etika bisnis Islam.

d. Keadilan dalam pemberian harga

Keadilan dalam pemberian harga berkaitan dengan perlakuan yang setara kepada seluruh konsumen dalam proses penjualan obat. Harga yang adil tidak hanya ditentukan oleh besaran nominalnya, tetapi juga oleh cara harga tersebut disampaikan dan diterapkan secara konsisten kepada setiap pembeli. Pemberian informasi harga yang sama, sikap pelayanan yang tidak membedakan, serta tidak adanya perlakuan khusus terhadap konsumen tertentu menjadi cerminan keadilan dalam praktik penjualan obat generik di apotek.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di Apotek Puspa, Keadilan dalam pelayanan terlihat dari sikap karyawan terhadap para

pelanggan. Semua konsumen diberi penjelasan mengenai harga dan informasi obat secara merata, baik dalam hal kesopanan maupun transparansi. Ibu Sri Setiarti, selaku karyawan kasir Apotek Puspa, mengungkapkan:

“Di Apotek Puspa, kami melayani semua konsumen dengan baik, tidak ada perbedaan dalam pelayanan. Baik yang membeli obat mahal maupun obat generik, semua tetap kami layani dengan sopan dan menjelaskan secara detail. Karena semua pasien sama-sama membutuhkan obat untuk sembuh.”¹⁰⁰

Pada penjelasan ini menunjukkan bahwa Apotek Puspa menerapkan prinsip keadilan dengan memberikan pelayanan dan informasi harga yang sama kepada seluruh konsumen. Tidak terdapat perbedaan perlakuan antara konsumen yang membeli obat dengan harga mahal maupun obat generik. Penyampaian informasi dilakukan secara sopan dan transparan kepada semua pembeli, sehingga setiap konsumen memperoleh hak yang sama dalam mengetahui harga dan informasi obat yang dibeli.

Pernyataan serupa juga diberikan oleh Ibu Fildatun Hasanah, sebagai asisten apoteker di Apotek Puspa, yang menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam pelayanan adalah salah satu komitmen utama apotek:

“Di tempat ini, semua pembeli mendapatkan pelayanan yang sama. Kami tidak membeda-bedakan siapa pun, entah yang dibeli itu obat mahal ataupun obat generik. Kami tetap menyambut dengan ramah

¹⁰⁰ Sri Setiarti, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

dan menjelaskan sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi, pelayanan di Apotek Puspa selalu adil dan merata bagi semua pembeli.”¹⁰¹

Selanjutnya penerapan prinsip keadilan dalam pemberian harga ditegaskan Asisten Apoteker yang menjelaskan bahwa keadilan dalam pemberian harga di Apotek Puspa menjadi bagian dari komitmen pelayanan apotek. Semua konsumen dilayani secara adil dan merata tanpa membedakan jenis obat yang dibeli. Penjelasan mengenai obat diberikan sesuai kebutuhan masing-masing konsumen, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diperlakukan secara tidak setara dalam proses transaksi.

Dari sudut pandang konsumen, Ibu Yuni, salah satu pelanggan tetap Apotek Puspa, juga berbagi pengalaman terkait pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, “Selama saya menjadi pelanggan di sini, tidak pernah ada perlakuan yang berbeda. Semua konsumen dilayani dengan ramah dan adil, terlepas dari jumlah belanjaan yang mereka bawa.” Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Ayu, salah satu konsumen di Apotek Puspa, “Saya sering membeli obat di sini, dan pelayanannya selalu konsisten. Karyawannya ramah kepada semua orang, tidak memilih-milih. Jadi saya merasa nyaman membeli obat di sini.”

Pada pengalaman dari kedua konsumen apotek puspa menunjukkan bahwa keadilan dalam pemberian harga di Apotek Puspa

¹⁰¹ Fildatul Hasanah, diwawancarai oleh Penulis, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, 13 Agustus 2025.

dapat dirasakan secara nyata dalam praktik pelayanan sehari-hari. Tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam penyampaian informasi harga maupun sikap pelayanan yang diberikan oleh karyawan apotek. Baik dari segi keramahan, kesopanan, maupun konsistensi pelayanan, seluruh konsumen dilayani dengan cara yang sama tanpa memperhatikan jumlah pembelian atau jenis obat yang dibeli. Kondisi ini memberikan rasa nyaman bagi konsumen serta memperkuat persepsi bahwa praktik penjualan di Apotek Puspa dijalankan secara adil dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa Apotek Puspa telah menerapkan prinsip keadilan dalam penetapan harga obat generik. Keadilan tersebut tercermin dari perlakuan yang sama kepada seluruh konsumen tanpa adanya diskriminasi, baik berdasarkan jenis obat yang dibeli, jumlah pembelian, maupun latar belakang sosial dan ekonomi konsumen. Setiap konsumen memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan informasi harga dan penjelasan obat secara jelas sebelum transaksi dilakukan.

Selain itu, keadilan dalam pemberian harga juga diwujudkan melalui sikap pelayanan karyawan yang konsisten, sopan, ramah, dan informatif kepada seluruh konsumen. Penyampaian informasi harga dan alternatif obat dilakukan secara terbuka, sehingga konsumen dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya tanpa adanya paksaan atau arahan untuk membeli obat dengan harga lebih tinggi. Hal ini menciptakan suasana pelayanan yang

adil, nyaman, serta menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap apotek. Kemudian, penerapan keadilan dalam penetapan harga di Apotek Puspa juga didukung oleh kepatuhan terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) serta kebijakan margin keuntungan yang wajar. Praktik tersebut menunjukkan adanya upaya apotek untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan perlindungan hak konsumen. Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan dalam pemberian harga di Apotek Puspa sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, khususnya dalam menegakkan keadilan (*al-'adl*), menghindari praktik yang merugikan konsumen, serta menghormati hak setiap pihak dalam transaksi jual beli.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penerapan prinsip etika bisnis islam di Apotek Puspa dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, yaitu:

a. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Proses Transaksi Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara, proses transaksi pembelian obat generik di Apotek Puspa berlangsung secara teratur dan terbuka. Proses transaksi tidak hanya melibatkan pembayaran, tetapi mencakup

berbagai tahapan seperti penerimaan resep, pemeriksaan ketersediaan obat, penjelasan mengenai harga, hingga pemberian obat kepada konsumen. Karyawan apotek selalu memberikan informasi mengenai harga sebelum transaksi dilakukan dan menanyakan apakah obat akan ditebus secara lengkap atau sebagian sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial konsumen. Tindakan ini mencerminkan sikap yang jujur, transparan, serta penuh perhatian terhadap kondisi sosial dan ekonomi pembeli, sehingga konsumen merasa aman, dihargai, dan puas dengan layanan yang diberikan.

Pelaksanaan transaksi jual beli obat generik di Apotek Puspa berjalan dengan tertib, jelas, dan tidak menimbulkan rasa khawatir atau ketidakpastian bagi para konsumen, tidak hanya dianggap sebagai kegiatan mencari keuntungan, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang harus adil, transparan, dan menjunjung hak konsumen. Hal ini sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang menekankan nilai kejujuran, keadilan, amanah, serta kebajikan (ihsan) dalam setiap aktivitas jual beli.¹⁰² Islam melihat aktivitas jual beli bukan hanya sebatas pertukaran barang dan uang, tetapi juga sebagai bentuk kegiatan sosial yang memiliki tanggung jawab moral. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

¹⁰² Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 41, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa: 29).¹⁰³

Di Apotek Puspa, proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung oleh pegawai kasir atau asisten apoteker kepada konsumen. Praktik ini sejalan dengan prinsip syariah dalam jual beli, di mana suatu transaksi dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek jual beli yang halal, serta adanya ijab dan kabul atau kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak.¹⁰⁴

Berdasarkan temuan di lapangan, konsumen di Apotek Puspa diberikan pilihan dalam pembelian obat, harga dijelaskan secara terbuka sebelum transaksi diselesaikan, serta konsumen diberi pilihan, harga barang dijelaskan secara jujur, dan pembelian dilakukan secara sukarela tanpa paksaan. Dengan demikian, transaksi di Apotek Puspa telah memenuhi prinsip sukarela dan menjauhkan diri dari tindakan penipuan atau kecurangan, sekaligus mencerminkan penerapan nilai etika bisnis

¹⁰³ Al-Qur'an QS. An Nisa [4]:29.

¹⁰⁴ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 17-18, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>.

Islam berupa kejujuran dan transparansi dalam setiap aktivitasnya sesuai prinsip kebajikan (Ihsan) (Jazil, Thuba, & Nur Hendrasto, 2021).

Selain itu, dari perspektif sikap dasar para pelaku usaha Muslim, kesesuaian prosedur transaksi Apotek Puspa melakukan penjualan obat sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Khususnya dalam hal penjualan obat resep, karyawan tidak memberikan obat kepada konsumen yang tidak membawa resep dokter. Setiap resep yang masuk diperiksa oleh apoteker atau asisten apoteker, obat yang diberikan berasal dari stok yang masih layak dan belum kedaluwarsa. Apotek berkomitmen untuk memberikan obat resep kepada konsumen dengan tanggung jawab dan kehat-hatian. Apotek memastikan bahwa obat yang diberikan aman serta sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. Sebelum pembuatan obat, apotek selalu memberikan informasi terkait harga, sehingga proses jual beli obat generik berlangsung secara transparan dan tidak ada informasi yang disembunyikan dari konsumen. Transparansi ini menunjukkan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur jual beli yang adil dan terbuka, sesuai dengan etika pemasaran dalam Islam yang menegaskan bahwa harga harus dijelaskan dengan jelas sebelum terjadinya akad dan tidak boleh merugikan konsumen.¹⁰⁵

Sikap para karyawan Apotek Puspa dalam menyampaikan informasi harga serta menjelaskan mengenai dosis obat menunjukkan bahwa mereka telah menerapkan sikap dasar pelaku usaha Muslim,

¹⁰⁵ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 49.

yaitu *siddiq* (jujur) dan *tabligh*, yang artinya menyampaikan informasi secara benar. Menurut Sonny Keraf, pasar yang memiliki kebebasan yang jelas akan mampu mengharmoniskan kepentingan-kepentingan pihak dan sekaligus mempertahankan mekanisme pasar itu sendiri, sehingga terbentuk iklim usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku ekonomi.¹⁰⁶ Pandangan ini selaras dengan prinsip *al-hurriyyah* dalam etika bisnis Islam, di mana setiap individu, termasuk konsumen, memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan ekonominya. Dalam konteks pembelian obat generik, konsumen diberi kemampuan untuk memilih jenis obat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*) telah diterapkan karena tidak ada paksaan dalam transaksi, dan konsumen dapat membuat keputusan secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan harga.

Dalam praktek jual beli di apotek Puspa tindakan ini sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek nomor 73 tahun 2016, yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk melakukan pemeriksaan resep, memberikan edukasi mengenai obat, serta menyerahkan obat dengan informasi yang benar.¹⁰⁷ Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap apotek wajib memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional,

¹⁰⁶ Abdul Aziz. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 273, https://www.academia.edu/35464288/ETIKA_BISNIS_PERSPEKTIF_ISLAM.

¹⁰⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 3 ayat (1).

aman, dan bertanggung jawab. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa:

- 1) Penyerahan obat kepada pasien wajib dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai cara penggunaan dan dosis obat, yang termasuk dalam bagian dari Pelayanan Informasi Obat (PIO) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- 2) Obat yang memerlukan resep dokter tidak boleh diberikan kepada pasien tanpa adanya resep yang sah, seperti yang diatur dalam Lampiran Permenkes 73/2016 pada bagian Dispensing (Penyerahan Obat). Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa apoteker wajib memeriksa dan menyerahkan obat sesuai dengan resep yang telah sah.
- 3) Apoteker dituntut untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan, termasuk transaksi, dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menekankan bahwa standar pelayanan kefarmasian harus selalu berorientasi pada keselamatan pasien serta dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dan tanggung jawab.

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b, pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tulus mengenai kondisi serta jaminan produk atau layanan yang ditawarkan. Dalam konteks

pelayanan di Apotek Puspa, hal ini terlihat dari transparansi informasi mengenai harga serta penjelasan mengenai obat yang diberikan kepada konsumen sebelum proses transaksi dilakukan.¹⁰⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa proses transaksi di Apotek Puspa telah dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di Apotek Puspa, prosedur transaksi yang dijalankan menunjukkan bahwa bisnis mereka menerapkan etika bisnis Islam. Nilai amanah terlihat dari cara pegawai tidak membagikan obat secara sembarangan dan tetap mematuhi ketentuan medis. Nilai fathanah atau profesionalitas juga terbaca ketika apoteker memeriksa dosis, jenis obat, dan keamanannya sebelum diberikan kepada pelanggan. Sikap ihsan ditunjukkan dengan cara menjelaskan aturan penggunaan obat agar efeknya maksimal dan tidak disalahgunakan. Selain itu, apotek juga mematuhi prinsip halal-haram dengan tidak menjual obat yang ilegal atau obat tertentu tanpa resep dokter. Konsistensi dalam menjalankan prosedur ini membuat transaksi lebih adil, teratur, dan aman, sehingga hak konsumen terjaga dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan jual beli di apotek tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memprioritaskan keselamatan dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dalam bisnis Islam.

¹⁰⁸ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (n.d.), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli obat generik di Apotek Puspa, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, telah mencerminkan penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam etika bisnis Islam. Prinsip kejujuran terlihat melalui transparansi informasi mengenai harga dan jenis obat sebelum transaksi dilakukan, serta tidak adanya penipuan atau menyembunyikan informasi kepada konsumen. Di sisi lain, prinsip keadilan terlihat dari perlakuan yang sama terhadap semua konsumen, kebebasan dalam memilih jenis obat yang dibeli, serta kegiatan transaksi yang dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan. Dengan demikian, proses transaksi jual beli obat generik di Apotek Puspa tidak hanya memenuhi standar prosedural, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

b. Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan konsumen dan

Keterbukaan Informasi di Apotek Puspa

Berdasarkan hasil wawancara, layanan yang diberikan di Apotek Puspa dianggap ramah, terbuka, dan memberikan informasi yang jelas. Karyawan tetap menjaga sikap sopan dan aktif membantu meskipun jumlah pengunjung cukup ramai. Pengunjung merasa didengar dan dihargai karena setiap pertanyaan yang diajukan selalu dijawab secara jujur dan sabar. Jika obat yang dicari tidak tersedia, pegawai akan menawarkan alternatif yang sejenis atau memperkenalkan obat generik yang harganya lebih terjangkau. Apotek juga menerapkan prinsip 5S

yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, sehingga menciptakan suasana yang hangat dan bermoral. Hal ini menunjukkan bahwa Apotek Puspa tidak hanya fokus pada penjualan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan moral terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam etika bisnis Islam, setiap kegiatan ekonomi harus didasari oleh nilai-nilai tauhid, kejujuran (*siddiq*), keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab (*amanah*). Usnan (2022) menjelaskan bahwa bisnis dalam Islam harus memberikan kemaslahatan, termasuk memberikan kepuasan kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial pelaku usaha. Sebagaimana di pelayanan terhadap konsumen di apotek Puspa yang memberikan alternatif obat lain kepada konsumen ketika stok obat habis atau konsumen merasa keberatan dengan harga obat yang terlalu tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Apotek Puspa tidak hanya fokus pada penjualan tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan moral terhadap kesehatan masyarakat. Sikap karyawan apotek Puspa menunjukkan kepekaan kepedulian kepada konsumen yang jika dirumuskan dalam bisnis Islam tidak hanya kegiatan yang bersifat material (ekonomi) tapi juga untuk kesejahteraan yang menyeluruh dan seimbang.¹⁰⁹ Nilai-nilai tersebut selaras dengan konsep Sumber Daya Insani (SDI), yang pada dasarnya berkaitan dengan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Usnan, *Etika Bisnis Islam: Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, (Jakarta: Gerbang Media Aksara, 2021), 97, <https://share.google/U3XXxWDEBwCvIgILL>.

¹¹⁰ Rizkiyatul Hasanah, Nazhifah Mildani Nuruddhuha, Arrum Maulidya, Ayyu Ainin Mustafidah, "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Di

Sumber Daya Insani (SDI) dapat digunakan secara optimal dan profesional, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan usaha, sekaligus menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan menghormati sesama manusia.¹¹¹ Keseimbangan antara profesionalitas dan nilai kemanusiaan merupakan dasar penting dalam menjalankan bisnis secara beretika. Selanjutnya, tujuan pengelolaan SDI adalah agar individu yang terlibat dalam suatu organisasi atau usaha mampu memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan serta dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan SDI dalam perspektif islam tidak hanya menekankan pada peningkatan produktivitas kerja, tetapi juga menanamkan rasa tanggung jawab moral dan spiritual dalam diri setiap individu. Hal ini dapat dilihat dalam praktik pelayanan di Apotek Puspa, di mana para karyawan menunjukkan sikap ramah, komunikatif, dan informatif terhadap setiap konsumen. Karyawan Apotek Puspa menerapkan 5S ketika berinteraksi dengan konsumen yaitu senyum, salam, sopan, dan santun.

Apotek puspa telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam pelayanan di apotek terutama dalam penjualan obat generik, yang dapat dilihat diantara; *pertama*, karyawan apotek memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh konsumen tanpa

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember,” *Jurnal Penelitian Nusantara*, vol. 1, no. 3 (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2025), 677, [Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.172](https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.172).

¹¹¹ Hasanah, Nuruddhuha, Maulidya, Mustafidah, "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, 678.

adanya diskriminasi, sehingga setiap konsumen merasa mendapat hak yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan.¹¹² *Kedua*, karyawan apotek selalu memberikan informasi secara jelas mengenai harga, aturan pakai, dan efek samping obat secara lengkap, jika konsumen ingin mengetahui lebih mendalam terkait obat yang dibeli. Dengan demikian Adanya keterbukaan informasi kepada konsumen tanpa ada yang disembunyikan informasi apapun yang dapat merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kejujuran.¹¹³ *Ketiga*, kesediaan karyawan apotek untuk menjawab pertanyaan konsumen dengan sabar dan memastikan obat yang diberikan sesuai resep dokter. Selain itu, apotek tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga membantu menawarkan alternatif obat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial konsumen. Sikap seperti ini mencerminkan penerapan nilai ihsan (kebajikan) dan tanggung jawab, di mana pelaku usaha wajib memberikan manfaat, Sikap ramah, jujur, serta membantu konsumen dalam memilih obat sesuai dengan kemampuan ekonomi. Hal ini merupakan bentuk dari nilai amanah dan keadilan, serta menunjukkan bahwa SDI di Apotek Puspa telah menjalankan perannya secara insaniyah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan etika yang diajarkan dalam prinsip bisnis Islam.

¹¹² Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 43, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

¹¹³ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 49.

Dari sisi keterbukaan informasi, Apotek Puspa memberikan penjelasan mengenai harga, manfaat obat, dan cara penggunaannya sebelum transaksi dilakukan. Keterbukaan ini memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengevaluasi dan memilih obat sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansial mereka. Tindakan ini sesuai dengan prinsip tabligh, yaitu karyawan harus mampu menyampaikan keunggulan produk dengan jujur dan transparan, tanpa berbohong atau menipu konsumen, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan.¹¹⁴ Dalam Islam, transaksi jual beli yang tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas dianggap sebagai bentuk *gharar* (ketidakjelasan), yang bisa berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, keterbukaan terkait harga dan penjelasan penggunaan obat merupakan bagian dari praktik jual beli yang halal dan adil.

Dalam Pelayanan yang diberikan di apotek Puspa, tingkat kepuasan konsumen dapat ditentukan oleh kinerja tenaga kefarmasian, seperti dalam hal komunikasi, penyampaian informasi, dan edukasi (KIE) yang bertujuan memberikan layanan berupa informasi edukatif mengenai penggunaan obat¹¹⁵ Komunikasi yang efektif merupakan bagian penting dalam menentukan kualitas layanan antara apoteker dan konsumen. Apoteker serta karyawan apotek bertugas memberikan

¹¹⁴ Muhammad Kamal Zubair, *Implementasi Etika Bisnis Islam*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 85, <https://share.google/GBvMjHACtuYZ20yYX>.

¹¹⁵ Muhammad Irsan, "Analisis Komunikasi Apoteke Dalam Pelayanan Optimal Studi Kasus Di Apotek Shan Farma Merauke: Review Jurnal," *Jurnal Ilmia Penelitian Madira Cendikia*, Vol. 3, No. 1 (Bandung: 2025), 4, <https://journal-mandiracendikia.com/jip-mc>.

informasi mengenai obat secara jelas, baik dalam hal dosis maupun aturan penggunaannya. Selain itu, apotek juga siap memberikan penjelasan mengenai efek samping obat apabila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut tentang obat yang telah dibeli.

Selain itu, aturan organisasi Ikatan Apoteker Indonesia melalui Kode Etik Apoteker Indonesia (KAEI) juga menegaskan bahwa apoteker wajib memberikan layanan yang didasarkan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan.¹¹⁶ Keterbukaan informasi mengenai efek samping obat juga menunjukkan komitmen Apotek Puspa terhadap perlindungan konsumen, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Meskipun tidak seluruh efek samping dijelaskan secara lengkap di awal, karyawan apotek tetap memberikan informasi secara jelas ketika konsumen bertanya.¹¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa Apotek Puspa tetap memberikan akses informasi secara penuh kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan mereka. Transparansi yang dilakukan selaras dengan standar pelayanan kefarmasian dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016, di mana tenaga kefarmasian wajib memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada konsumen.¹¹⁸

¹¹⁶ Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, "*Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia*," (IAI, Jakarta: 2020), 10-12, <https://share.google/zp5q8aVtemKCCxN6G>.

¹¹⁷ Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (n.d.), Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pasal 3 ayat (1).

Keterbukaan informasi pada transaksi tersebut menunjukkan bahwa apotek puspa menjadikan kejujuran dan keadilan sebagai dasar utama dalam menjalankan usahanya. Pihak apotek berupaya memberikan pelayanan terbaik tanpa merugikan orang lain. Prinsip tauhid merupakan dasar utama dalam etika Islam, karena merupakan inti dari seluruh ajaran dan nilai-nilai agama ini. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa tujuan utama beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan memperbaiki sikap serta perilaku etis dalam berinteraksi di tengah masyarakat. Prinsip tauhid juga sangat berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.¹¹⁹ Dengan prinsip tauhid, semua aktivitas bisnis dianggap sebagai bagian dari ibadah dan tanggungjawab yang harus dikerjakan secara benar dan tulus.

Dengan demikian, Apotek Puspa telah menerapkan etika bisnis Islam dalam aspek pelayanan dan keterbukaan informasi. Pelayanan yang ramah, jujur, komunikatif, serta pemberian informasi harga dan manfaat obat secara terbuka membuktikan adanya nilai keadilan, amanah, dan ihsan dalam setiap aktivitas bisnis. Praktik tersebut tidak hanya memenuhi aturan regulasi dan perlindungan konsumen, tetapi juga mencerminkan prinsip jual beli yang halal serta sesuai dengan ajaran Islam.

¹¹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 13.
https://www.academia.edu/35464288/ETIKA_BISNIS_PERSPEKTIF_ISLAM.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa karyawan apotek memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi konsumen. Selain itu, karyawan juga bersedia membantu konsumen dalam memilih obat generik yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan finansialnya, termasuk memberikan alternatif obat ketika harga obat dirasa terlalu tinggi atau stok obat tidak tersedia. Praktik ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kondisi konsumen. Temuan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dalam etika bisnis Islam. Menurut Jazil, Thuba, dan Nur Hendrasto (2021), prinsip keadilan menuntut pelaku usaha untuk memperlakukan konsumen secara setara, tidak diskriminatif, serta tidak merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Dengan memberikan pelayanan yang adil dan membantu konsumen memperoleh obat sesuai kebutuhannya, Apotek Puspa telah menerapkan prinsip keadilan sebagaimana ditekankan dalam etika bisnis Islam.

Selain mencerminkan prinsip keadilan, praktik pelayanan di Apotek Puspa juga sejalan dengan nilai kejujuran dalam etika bisnis Islam. Hal ini terlihat dari sikap karyawan yang menyampaikan informasi secara terbuka mengenai harga, aturan pakai, manfaat, serta efek samping obat sebelum transaksi dilakukan. Menurut Zakiyah dkk.

(2024), kejujuran merupakan salah satu nilai utama dalam etika bisnis Islam yang diwujudkan melalui transparansi dan keterbukaan informasi kepada konsumen, sehingga tidak terjadi penyesatan atau kerugian bagi pihak lain. Dengan adanya transparansi dalam penyampaian informasi obat, praktik jual beli di Apotek Puspa menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang diterapkan juga dilandasi oleh nilai kejujuran sebagai dasar moral dalam setiap transaksi.

2. Analisa Penerapan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Penetapan Harga Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Etika Bisnis Islam

a. Penetapan Prinsip Keadilan dan Kejujuran dalam Kebijakan Harga dan Margin Obat Generik Di Apotek Puspa

Berdasarkan hasil wawancara, Apotek Puspa hanya menjual obat-obatan yang telah memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa apotek menjaga aspek legalitas, mutu, dan keamanan produk sebelum diberikan kepada konsumen. Selain itu, Apotek Puspa juga mematuhi aturan pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk obat generik, sehingga harga yang ditetapkan kepada konsumen tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini menunjukkan bahwa apotek menjaga aspek legalitas, mutu, dan keamanan produk sebelum diberikan kepada konsumen. Praktik ini mencerminkan penerapan prinsip ilmu

pengetahuan, karena keputusan dalam penyediaan obat dilakukan berdasarkan pengetahuan yang benar tentang kualitas, keamanan, dan regulasi obat¹²⁰

Selain itu, Apotek Puspa juga mematuhi peraturan pemerintah terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk obat generik, sehingga harga yang diberikan kepada konsumen tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya menunjukkan ketaatan terhadap aturan negara, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam, khususnya prinsip keadilan dan kejujuran. Dalam Islam, keadilan dalam jual beli diwujudkan melalui penentuan harga yang tidak merugikan pihak lain, baik produsen, penjual, maupun konsumen, sehingga setiap pelaku usaha diperlakukan secara adil dan mendapatkan haknya masing-masing tanpa ada yang dirugikan.¹²¹ Prinsip ini menuntut agar pelaku bisnis tidak menetapkan harga secara zalim atau mengambil keuntungan yang berlebihan (*gharar*). Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (QS. Asy-Syu’ara: 183)¹²²

Pada ayat ini manusia diperingatkan untuk tidak melakukan tindakan zalim dan merugikan hak orang lain, terutama dalam hal-hal

¹²⁰ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 41-42, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

¹²¹ Jazil, Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, 43.

¹²² Al-Qur’an Asy-Syu’ara [26]:183.

yang berkaitan dengan urusan muamalah seperti kegiatan jual beli. Dalam konteks bisnis modern, termasuk dalam praktik perdagangan obat di apotek, ayat ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi yang dilakukan. Apotek Puspa menerapkan kebijakan penetapan harga obat generik berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan sikap untuk tidak mengambil keuntungan secara berlebihan serta memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh obat dengan harga yang terjangkau.

Dengan demikian, penetapan harga di Apotek Puspa sudah sesuai dengan pesan moral yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu tidak merugikan hak-hak manusia dalam aspek ekonomi. Jika harga ditetapkan di luar batas yang wajar, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman ekonomi. Dengan menerapkan kebijakan harga yang wajar, apotek menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Prinsip keadilan dalam menentukan harga menuntut agar pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial serta kesejahteraan masyarakat.¹²³

Penerapan kebijakan harga yang sesuai dengan HET juga menunjukkan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan konsumen menerima produk dengan harga yang wajar dan sesuai

¹²³ Suminingsih, *Etika Bisnis Islam*, (Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI, 2020), 26, <https://share.google/oX23zG8qy5TfPM5dL>.

aturan.¹²⁴ Sikap tanggung jawab ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan menunjukkan komitmen apotek terhadap standar kualitas serta etika bisnis yang baik. Dalam konteks etika pengelolaan pemasaran menurut Islam, harga harus ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal:

- a. Menetapkan beban biaya produksi yang wajar
- b. Menjadikan harga sebagai alat kompetisi yang sehat
- c. Mempertimbangkan daya beli masyarakat
- d. Menentukan keuntungan secara adil, dan
- e. Menggunakan harga sebagai sarana promosi tanpa menipu atau merugikan pihak lain.¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, Apotek Puspa menetapkan harga obat generik sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Penetapan harga ini selaras dengan konsep penetapan harga dalam ekonomi Islam. Secara prinsip, Islam memandang mekanisme pasar sebagai proses alami yang terbentuk oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa adanya paksaan atau ketidakadilan. Ibn Taimiyah menyatakan bahwa perubahan harga terjadi karena fluktuasi permintaan dan penawaran, sementara Adiwarmarman Karim menegaskan bahwa transaksi harus didasarkan pada asas kerelaan kedua belah pihak

¹²⁴ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 44-45, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

¹²⁵ Usnan, *Etika Bisnis Islam: Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, (Jakarta: Gerbang Media Aksara, 2021), 69-70, <https://share.google/U3XXxWDEBwCvIgILL>.

(rela sama rela). Harga keseimbangan yang terbentuk melalui mekanisme pasar ini disebut sebagai saman misl (*price equivalent*).¹²⁶

Walaupun demikian, Islam membolehkan intervensi pasar ketika terjadi distorsi dalam *supply-demand* atau ketidakadilan harga. Pemerintah dapat mengendalikan harga untuk menjaga keseimbangan, termasuk melalui intervensi langsung agar harga tetap wajar.¹²⁷ Para ahli fiqh juga membolehkan penetapan harga ketika kenaikan harga berlebihan terjadi, terdapat potensi eksploitasi konsumen, atau ketika suatu barang sangat dibutuhkan masyarakat luas.¹²⁸ Karena obat merupakan kebutuhan primer yang berkaitan dengan keselamatan jiwa, maka langkah Apotek Puspa dalam menerapkan HET menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah sekaligus sejalan dengan prinsip ekonomi Islam, yaitu menjaga keterjangkauan harga, mencegah *ghaban fāhisy* (harga terlalu tinggi), melindungi konsumen, serta mewujudkan kemaslahatan umum.

Kebijakan penetapan harga obat generik di apotek puspa sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015, yang mewajibkan apotek untuk memberikan informasi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi harga obat. Dalam

¹²⁶ Isnaini Harahap, dan M. Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, Cetakan pertama (Medan: FEBI UN-SU Prss, 2016), 113-114, <http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The%20handbook%20Of%20islamic%20economics%20ok.pdf>.

¹²⁷ Harahap, dan Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, 115.

¹²⁸ Harahap, dan Ridwan, *The Handbook of Islamic Economics*, 116.

pada pasal ini apotek hanya bisa menjual obat generik dengan harga di bawah HET atau sama dengan HET.¹²⁹

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, berikut adalah perbandingan mengenai harga Obat generik di Apotek Puspa dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 4.2

Daftar Harga Obat Generik Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

NO	NAMA OBAT	KEMASAN	HET + PPN
1	Amoksisilin kaplet 500 mg	ktk 10 x 10 kaplet	49.950
2	Asam mefenamat kaplet 500 mg	ktk 10 x 10 kaplet	23.760
3	Ibuprofen tablet 400 mg	ktk 10 x 10 tablet	27.680
4	Metilprednisolon tablet 8 mg	ktk 10 x 10 tablet	78.975
5	Ketokonazol tablet 200 mg	ktk 5 x 10 tablet	27.675
6	Alopurinol tablet 300 mg	ktk 3 x 10 tablet	9.923
7	Parasetamol tablet 500 mg	ktk 10 x 10 tablet	14.175
	Parasetamol tablet 500 mg	Btl 1000 tablet	67.500
8	Simvastatin tablet 20 mg	ktk 3 x 10 tablet	41.553
	Simvastatin tablet 20 mg	ktk 5 x 10 tablet	69.255
9	Piroksikam tablet 10mg	ktk 10 x 10 tablet	11.340
	Piroksikam kapsul 10mg	Ktk 12 x 10 kapsul	13.635
10	Sefiksim kapsul 100 mg	Ktk 5 x 10 kapsul	161.636
	Sefiksim kapsul 100 mg	Ktk 3 x 10 kapsul	96.981
11	Amplodipin tablet 10 mg	Ktk 3 x 10 tablet	68.580
	Amplodipin tablet 10 mg	Ktk 5 x 10 tablet	114.264
12	Cetirizine tablet 10 mg	ktk 3 x 10 tablet	13.365
	Cetirizine tablet 10 mg	ktk 5 x 10 tablet	21.161
13	Zinc tablet 20 mg	ktk 10 x 10 tablet	64.125
14	Betahistin Mesilat tablet 6 mg	ktk 3 x 10 tablet	37.422

Sumber: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/MESKES/SK/II/2012¹³⁰

¹²⁹ Peraturan Menteri Kesehatan No 98 Tahun 2015 Pemberian Informasi HET pada Obat.

¹³⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/Menkes/Sk/Ii/2012, <https://share.google/Df7fazosnhrtwmoyx>, 30 Juli 2025, Pukul 03:24 Wib.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan harga obat generik yang dijual di Apotek Puspa dengan dua acuan harga, yaitu harga eceran tertinggi (HET) yang tercantum di kemasan obat dan HET yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 092/Menkes/SK/II/2012. Semua data harga obat yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga per lembar (per strip), sehingga memudahkan perbandingan antara berbagai sumber obat.

Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui apakah harga jual obat generik di apotek lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dibandingkan harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Terdapat beberapa obat yang tidak dapat dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) Kemenkes 2012 karena adanya perbedaan dosis atau karena obat tersebut tidak tercantum dalam daftar HET tahun 2012. Karena alasan tersebut, tabel berikut juga dilengkapi dengan kolom keterangan untuk memberikan informasi mengenai kecocokan harga dengan acuan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur harga obat di Apotek Puspa serta hubungannya dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Tabel 4.3

Perbandingan Harga Obat Generik di Apotek Puspa dengan Harga Eceran Tertinggi Kebijakan Pemerintah

No	Nama Obat	Harga Jual Apotek Puspa	HET di Kemasan	HET Menkes 2012	Keterangan
1	Amoxicillin 500 mg	6.500	15.300	4.995	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
2	Asam Mefenamat 500 mg	4.000	7.411	2.376	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
3	Ibuprofen 400 mg	5.000	6.400	2.768	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
4	Methylprednisolone 8 mg	7.000	7.550	7.898	- Di bawah HET
5	Ketokonazol 200 mg	6.000	6.400	5.535	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
6	Allopurinol 300 mg	7.500	8.100	3.307	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
7	Paracetamol 500 mg	4.000	4.175	1.418	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
8	Simvastatin 20 mg	6.000	6.370	13.851	- Di bawah HET
9	Piroxicam 10 mg	3.000	3.784	1.134	- Di bawah HET kemasan - Di atas HET 2012
10	Cefixime 200 mg	28.000	50.900	-	- Di bawah HET kemasan - Tidak dapat dibandingkan (HET hanya tersedia dosis 100mg)
11	Amlodipine 10 mg	5.500	6.200	22.853	Di bawah HET
12	Cetirizine 10 mg	4.000	12.000	4.455	Di bawah HET
13	Acetycysteine 200 mg	6.000	22.900	-	Tidak tercantum di HET 2012
14	Zinc Sulfate 20 mg	6.000	15.000	6.413	Di bawah HET
14	Betahistine 6 mg	6.500	8.300	12.474	Di bawah HET

Sumber: Dokumentasi Apotek Puspa (2025) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 092/MESKES/SK/II/2012, diolah oleh peneliti (2025).

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi pada tabel perbandingan harga obat generik yang mencakup harga jual di Apotek Puspa, Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tercantum pada kemasan,

serta HET yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Tahun 2012, dapat dilihat bahwa beberapa obat memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan HET tahun 2012. Obat-obat tersebut meliputi Amoxicillin, Asam Mefenamat, Ibuprofen, Ketokonazol, Allopurinol, Paracetamol, dan Piroxicam. Secara deskriptif, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harga obat dengan standar HET 2012. Namun, perbedaan harga tersebut tidak secara otomatis mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan. Karena, HET Tahun 2012 telah berlaku lebih dari sepuluh tahun, sehingga tidak lagi mencerminkan biaya produksi dan distribusi obat yang terus mengalami peningkatan setiap tahun.

Selain itu, Selain itu, kenaikan harga bahan baku obat yang dipengaruhi oleh kondisi pasar global serta perbedaan antar produsen menyebabkan variasi harga di antara obat generik, meskipun semuanya mengandung zat aktif yang sama. Perbedaan ini bisa terjadi akibat perbedaan dalam formula, biaya produksi, serta strategi distribusi yang digunakan oleh setiap produsen. Literatur juga menyatakan bahwa obat generik yang berlogo pada dasarnya memiliki struktur biaya produksi dan promosi yang lebih rendah dibandingkan obat merek, serta berada dalam persaingan harga yang ketat sekaligus tetap mempertahankan standar mutu yang tinggi.¹³¹

¹³¹ Tamran Ismail, Ari Pernama Putra, Luh Putu Desy Puspaningrat, Muhammad Buchari SQ., "Perbandingan Kadar Disolusi Tablet Allopurinol Generik Berlogo Dan Generik Bermerek Yang Beredar Dikota Kupang Provinsi Ntt," *Jurnal Farmasi Kryonaut*, 2, no.2 (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng Program Studi Sarjana Farmasi 2023), 140, <https://doi.org/10.59969/jfk>.

Pada peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 98 tahun 2015 tentang pemberian informasi harga eceran tertinggi obat pasal 7 menyatakan bahwa Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apotek, toko obat, dan instalasi farmasi di rumah sakit atau klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), asalkan harga yang tercantum pada label tersebut tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku. Maka apotek, toko obat, serta instalasi farmasi di rumah sakit atau klinik wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat.¹³² Oleh karena itu, kenaikan harga di atas HET 2012 masih dapat dikatakan wajar selama tidak melebihi batas biaya operasional yang rasional. Namun, jika terdapat obat yang memiliki harga jauh lebih tinggi tanpa adanya penjelasan yang memadai mengenai peningkatan biaya, maka kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi konsumen.

Sebaliknya, terdapat beberapa obat generik yang harganya lebih rendah dibandingkan HET Kemenkes tahun 2012, seperti Methylprednisolon 8 mg, Simvastatin 20 mg, Amlodipine 10 mg, Cetirizine 10 mg, Zinc Sulfate 20 mg, dan Betahistine 6 mg. Temuan ini menunjukkan bahwa harga obat di Apotek Puspa tidak seluruhnya lebih tinggi dari HET lama, sehingga kebijakan penentuan harga di apotek tetap memperhatikan kemampuan berbelanja masyarakat. Perbedaan harga yang lebih rendah ini juga menunjukkan bahwa harga obat generik

¹³² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat, Pasal 7.

bisa berbeda antar pabrik, karena proses produksi, biaya operasional, serta kebijakan margin perusahaan tidak selalu sama.

Selain itu, adanya HET yang tercantum di kemasan obat, yang diperbarui langsung oleh industri farmasi sesuai dengan peraturan Permenkes 98/2015, menjadi acuan harga yang lebih tepat dibandingkan HET tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa struktur harga di apotek tidak secara langsung merugikan konsumen, melainkan mengikuti perubahan harga yang diatur oleh pemerintah.¹³³ Terdapat dua obat generik yang tidak dapat dibandingkan dengan HET Kemenkes 2012 karena ketidaksesuaian data. Cefixime 200 mg tidak tercantum dalam HET Kemenkes 2012 karena daftar tersebut hanya mencakup harga untuk dosis 100 mg, sehingga tidak relevan untuk melakukan perbandingan. Di sisi lain, Acetylcysteine 200 mg sama sekali tidak terdapat dalam daftar HET Kemenkes 2012, sehingga analisis perbandingan harga tidak dapat dilakukan. Situasi ini menunjukkan bahwa daftar HET pemerintah tidak selalu mencakup semua variasi dosis obat generik yang tersedia saat ini, sehingga apotek cenderung mengacu pada HET pada kemasan sebagai acuan utama, karena daftar tersebut diperbarui secara berkala oleh industri farmasi sesuai dengan regulasi terbaru.

Dari seluruh data yang dianalisis, semua obat generik yang dijual di Apotek Puspa memiliki harga jual yang lebih rendah

¹³³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

dibandingkan HET yang tercantum pada kemasan produk. Hal ini menunjukkan bahwa apotek tersebut secara konsisten mengikuti acuan harga yang ditetapkan oleh pabrik, yang merupakan kebijakan resmi dalam industri farmasi sesuai dengan mekanisme regulasi Permenkes 98/2015. Dengan demikian, kebijakan harga yang dijalankan oleh Apotek Puspa menunjukkan komitmen untuk menjual obat pada tingkat harga yang di bawah batas maksimum yang ditetapkan produsen, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan aksesibilitas dan menjaga kepercayaan konsumen.

Pada Penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik penjualan obat generik di Apotek Puspa berkaitan erat dengan nilai-nilai utama dalam etika bisnis Islam. Nilai keadilan menekankan perlakuan yang adil bagi semua pihak, termasuk dalam menentukan harga dan memberikan informasi mengenai obat kepada konsumen, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses transaksi. Nilai kejujuran memerlukan sikap terbuka dan transparan dalam menjelaskan harga, manfaat, serta cara penggunaan obat kepada konsumen, sehingga menghindari tindakan pemalsuan atau penipuan. Prinsip amanah juga terlihat melalui upaya apotek dalam memastikan kualitas obat yang dijual serta menjaga semua produk memiliki izin edar resmi, yang merupakan bentuk tanggung jawab terhadap standar syariah.

Prinsip tanggung jawab sosial terlihat dari komitmen apotek untuk menyediakan obat generik dengan harga yang terjangkau, sehingga

tetap memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.¹³⁴ Dengan demikian, praktik yang dijalankan di Apotek Puspa dapat dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam perspektif etika bisnis Islam, yaitu memberikan hak setiap pihak secara proporsional serta menjalankan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹³⁵

Berdasarkan hasil analisis tabel perbandingan harga obat generik di Apotek Puspa, dapat disimpulkan bahwa harga obat generik tidak sama. Beberapa obat generik dijual dengan harga yang lebih tinggi dari HET Kementerian Kesehatan tahun 2012, sementara obat lainnya dijual dengan harga yang lebih rendah. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti usia HET yang telah lama berlaku, kenaikan harga bahan baku, serta perbedaan produsen obat. Meskipun demikian, seluruh obat yang dijual tetap berada dalam kisaran harga yang tercantum pada kemasan, yang menunjukkan bahwa apotek menggunakan harga produsen yang lebih baru dan relevan dengan kondisi pasar saat ini.

Dalam kerangka etika bisnis Islam sebagaimana dikemukakan oleh Jazil, Thuba, dan Nur Hendrasto (2021), prinsip keadilan menuntut agar pelaku usaha menetapkan harga secara proporsional, tidak merugikan konsumen, serta tidak menimbulkan praktik eksploitasi. Temuan di Apotek Puspa menunjukkan bahwa perbedaan harga obat

¹³⁴ Zakiyah, Makhshushi; Nafiuddin; Rahmani; Wati, dalam Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya, *Etika Bisnis Syariah*, (Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia), 2024, 8-9, <https://eprints.umg.ac.id>.

¹³⁵ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 41-42, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

generik bukan merupakan bentuk ketidakadilan, melainkan penyesuaian terhadap kondisi ekonomi dan struktur biaya yang rasional, sehingga hak konsumen tetap terpenuhi.

Penetapan harga obat generik di Apotek Puspa juga selaras dengan etika penetapan harga dalam perspektif etika bisnis Islam yang menekankan pentingnya pertimbangan biaya yang wajar, daya beli masyarakat, serta penentuan keuntungan secara adil sebagaimana dijelaskan oleh Usnan (2021). Dalam praktiknya, apotek menetapkan harga secara terbuka dan tidak menyembunyikan informasi harga dari konsumen, sehingga konsumen dapat mengetahui dasar penetapan harga obat yang dibeli. Dengan demikian, kebijakan penetapan harga obat generik di Apotek Puspa dapat dinilai telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam praktik jual beli. Penetapan harga dilakukan secara proporsional dan transparan, sehingga memberikan hak kepada konsumen secara adil tanpa menimbulkan praktik yang merugikan.

Selain itu, dalam hal margin keuntungan, Apotek Puspa menerapkan margin sebesar 15% untuk semua jenis obat, baik yang merupakan obat generik maupun obat paten. Kebijakan ini masih berada dalam batas yang wajar dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penerapan margin keuntungan ini menunjukkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi apotek dan kepentingan

konsumen, sehingga prinsip keadilan dalam mendistribusikan manfaat dapat terjaga. Kebijakan margin yang tidak melebihi HET sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Dengan demikian, kebijakan harga yang diterapkan oleh apotek mencerminkan upaya untuk melindungi konsumen serta menjaga kemaslahatan bersama antara pelaku usaha dan pengguna jasa.¹³⁶

Dalam pandangan etika bisnis Islam, mendapatkan keuntungan adalah hal yang dibenarkan asalkan dicapai melalui cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dalam ekonomi syariah, yang menekankan pentingnya perlakuan adil dalam berbagai aktivitas perdagangan serta mencegah segala bentuk kecurangan dan penipuan dalam proses transaksi bisnis.¹³⁷ Prinsip tersebut terlihat dari kebijakan Apotek Puspa yang tidak memperoleh margin keuntungan secara berlebihan, tidak melakukan penetapan harga secara satu pihak, serta tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dari pemerintah.

¹³⁶ An Ras Try Astuti. *Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontemporer)*. (Parepare: IAIN Parepare Nusanantara Press, 2022), 8, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU%20ETIKA%20BISNIS%20ISLAM%20ANRAS%20neww.pdf>.

¹³⁷ Adhy Firdaus. Siti Pratiwi Husain. Djoko Soelistya. *Etika Bisnis Syariah*, (Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), 65, <https://eprints.umg.ac.id>. 1 September 2025, pukul 12:21 WIB.

Selain itu, kebijakan margin yang tetap dan tidak melebihi batas Harga Eceran Tertinggi (HET) berarti apotek tidak memanfaatkan posisi dominasi pasar untuk memperoleh keuntungan yang berlebihan. Hal ini sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹³⁸ Praktik penentuan harga yang wajar dan transparan menunjukkan bahwa apotek tidak melakukan tindakan monopoli atau mengejar keuntungan yang merugikan konsumen, yang selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan persaingan dalam kebaikan dan tidak saling merugikan. Sementara itu, dalam etika bisnis Islam, prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) meminta para pelaku usaha untuk memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, prinsip tauhid mengingatkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus didasari kejujuran (*siddiq*) dan keamanan (amanah) agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kebijakan penetapan margin harga yang wajar di Apotek Puspa mencerminkan penerapan nilai amanah, yaitu menjaga kepercayaan konsumen dengan tidak memperoleh keuntungan yang berlebihan, mematuhi aturan harga yang berlaku, serta memastikan proses transaksi berlangsung secara jujur dan transparan. Dalam tinjauan bisnis Islam, amanah tidak hanya berarti menjaga kejujuran dalam bertransaksi, tetapi juga mencakup tanggung

¹³⁸ Firdaus, Husain, Soelistya, *Etika Bisnis Syariah*, 67-68.

jawab dalam melindungi kepentingan semua pihak, mengelola sumber daya secara bijaksana, serta membangun hubungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.¹³⁹

Selain itu, prinsip ketauhidan mengajarkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus didasari oleh kesadaran spiritual bahwa rezeki berasal dari Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha harus mampu mengendalikan diri dari cara kerja yang dapat merugikan orang lain. Dengan menerapkan prinsip ketauhidan, kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga mencari nilai keberkahan, keadilan, dan manfaat sosial.¹⁴⁰

Penetapan harga dan pengambilan keuntungan di Apotek Puspa dapat disimpulkan telah sesuai dengan peraturan pemerintah serta prinsip nilai etika bisnis Islam. Tingkat margin keuntungan sebesar 15% masih dalam batas yang wajar dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga tidak merugikan pembeli. Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah, karena apotek tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, menjaga transparansi harga, serta memastikan obat generik tetap terjangkau, legal, aman, dan berkualitas. Dengan menerapkan kebijakan ini, keseimbangan antara kepentingan ekonomi apotek dan kemaslahatan konsumen dapat tercapai. Dengan demikian, praktik jual beli obat generik di Apotek

¹³⁹ Firdaus. Husain, Soelistya. "Etika Bisnis Syariah," 8-9

¹⁴⁰ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 41-42, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

Puspa telah menunjukkan implementasi nilai ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan keberkahan.

b. Penerapan Prinsip Keadilan dalam penjualan di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil wawancara, Apotek Puspa menerapkan prinsip kejujuran dengan cara memberikan informasi terbuka tentang obat generik dan harga jualnya. Meskipun daftar harga tidak dipasang di etalase, karyawan apotek tetap menyampaikan harga obat secara langsung sebelum proses pembelian dilakukan. Setelah konsumen mengetahui harga dan menyetujui pembelian, transaksi terjadi secara sukarela tanpa ada paksaan. Cara ini sesuai dengan rukun dan syarat sah dalam jual beli, yaitu kejelasan barang dan kejelasan harga (*ta'rif al-tsaman*) untuk menghindari gharar atau ketidakpastian dalam transaksi.¹⁴¹

Selain itu, karyawan apotek menjelaskan jika terjadi perbedaan harga antara obat yang memiliki komposisi manfaat yang sama. Apotek menyebutkan bahwa perbedaan harga disebabkan oleh perbedaan produsen atau merek, bukan karena perbedaan kualitas atau khasiat obat. Penyampaian informasi ini memungkinkan konsumen memahami alasan perbedaan harga secara utuh sebelum memutuskan pembelian. Temuan lapangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip keilmuan, amanah,

¹⁴¹ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta. 2009), 19-23, <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>.

dan tabligh dalam etika bisnis Islam sebagaimana dikemukakan oleh Jazil, Thuba, dan Nur Hendrasto (2021). Prinsip keilmuan tercermin dari kemampuan karyawan apotek dalam memahami karakteristik produk yang dijual, sedangkan prinsip amanah dan tabligh terlihat dari sikap menyampaikan informasi secara benar, jujur, dan tidak menyembunyikan hal-hal penting yang dapat memengaruhi keputusan konsumen.

Dalam etika bisnis Islam, kejujuran dipandang sebagai prasyarat utama terwujudnya keadilan dalam setiap transaksi, karena melalui kejujuran konsumen memperoleh hak atas informasi yang lengkap sebelum mengambil keputusan pembelian. Penerapan nilai kejujuran tersebut tercermin dari sikap keterbukaan Apotek Puspa dalam menyampaikan informasi yang benar dan relevan kepada konsumen, sehingga konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan secara sadar dan rasional, termasuk dalam menentukan jumlah obat yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, dan Djoko Soelistya (2024) yang menegaskan bahwa kejujuran merupakan fondasi etika bisnis syariah yang berfungsi menjamin terpenuhinya hak konsumen serta mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi.

Setelah transaksi selesai, konsumen akan mendapatkan struk pembelian sebagai bukti harga dan jumlah pembayaran. Kehadiran struk ini mencegah terjadinya manipulasi harga dan menunjukkan tanggung jawab dalam transaksi. Praktik transparansi pembayaran ini sejalan

dengan nilai-nilai etika bisnis islam tanggung jawab dan amanah, yaitu melakukan transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam proses bisnis.¹⁴² Pemberian struk serta perlakuan yang sama kepada semua konsumen menunjukkan penerapan prinsip keadilan, yaitu memberi hak secara adil dan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap pelanggan, sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang menyatakan bahwa para pengusaha wajib memperlakukan semua pelanggan secara setara.¹⁴³

Selain itu, praktik ini telah memenuhi ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7, yang mewajibkan pelaku usaha menyampaikan informasi benar, jelas, dan jujur terkait barang dan harga.¹⁴⁴ Dengan demikian, Apotek Puspa telah menjalankan mekanisme penjualan sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan hukum positif negara, yaitu terbuka dalam harga, jujur dalam informasi produk, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Apotek Puspa juga menyediakan informasi mengenai kondisi obat, termasuk tanggal kedaluwarsa dan izin edar. Tindakan ini bertujuan melindungi konsumen, karena pelaku usaha dilarang menjual barang yang telah rusak, cacat, atau tidak memenuhi standar tanpa memberikan

¹⁴²Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya, *Etika Bisnis Syariah*, (Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024), 8-9, <https://eprints.umg.ac.id>.

¹⁴³ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 43, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

¹⁴⁴ UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

informasi yang tepat, sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 8.¹⁴⁵

Hasil wawancara dalam penyampaian informasi kualitas obat generik di apotek Puspa menunjukkan karyawan apotek menyampaikan bahwa obat generik aman, berkhasiat, dan sudah memiliki izin edar resmi. Penjelasan ini membantu melenyapkan prasangka bahwa obat generik memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan obat bermerek. Praktik edukasi ini merupakan bagian dari ihsan dan amanah, karena apotek tidak memanfaatkan ketidaktahuan konsumen untuk memperoleh keuntungan tambahan. Dari sudut pandang etika bisnis Islam, memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan adalah bagian dari prinsip kebenaran dan kebajikan. Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mengalami kerugian dalam bertransaksi.¹⁴⁶

Selain itu, Prinsip ini juga sejalan dengan cara pemasaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu menyampaikan informasi produk secara jujur tanpa berlebihan dan tanpa menipu konsumen.¹⁴⁷ Berdasarkan segi regulasi, praktik edukasi tersebut sesuai dengan etika profesi kefarmasian yang menuntut tenaga kesehatan memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada konsumen. Upaya ini

¹⁴⁵ UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

¹⁴⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 46-47, https://www.academia.edu/35464288/ETIKA_BISNIS_PERSPEKTIF_ISLAM.

¹⁴⁷ Usnan, *Etika Bisnis Islam: Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*, (Jakarta: Gerbang Media Aksara, 2021), 95, <https://share.google/U3XXxWDEBwCvIgILL>.

menunjukkan bahwa apotek tidak hanya melakukan transaksi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial dalam pelayanan obat.

Dalam prinsip keadilan dalam melayani konsumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek Puspa memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumen, tanpa mempertimbangkan status sosial, jenis obat yang dibeli, atau penampilan pembeli. Karyawan apotek memberikan pelayanan dengan sikap ramah, memberikan informasi mengenai obat, serta menjelaskan harga secara jelas dan sopan. Sikap ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan (*'adl*) dalam etika bisnis Islam, yaitu memperlakukan semua pihak secara setara dalam setiap transaksi. Pelayanan yang ramah dan informatif juga merupakan bentuk ihsan, karena tidak hanya berfokus pada penjualan, tetapi juga memberikan manfaat tambahan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan nilai dasar yang dimiliki oleh pelaku bisnis Muslim, yaitu sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, yang menekankan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menjaga kepercayaan dan kemaslahatan masyarakat.¹⁴⁸ Dengan demikian, praktik pelayanan di Apotek Puspa mencerminkan penerapan prinsip kejujuran dan keadilan sesuai dengan etika bisnis Islam dan juga mendukung perlindungan konsumen serta keberlanjutan usaha.

¹⁴⁸ Thuba Jazil, Nur Hendrasto, *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*, (Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), 49, <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam penjualan obat generik di Apotek Puspa terlihat dari mekanisme transaksi yang jelas, penyampaian informasi secara jujur, serta perlakuan yang sama bagi semua konsumen. Apotek tidak hanya memastikan bahwa harga dan kualitas obat sudah jelas sebelum pembelian dilakukan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada konsumen untuk membuat keputusan secara mandiri dan sukarela. Praktik ini menunjukkan bahwa keadilan dalam penjualan obat generik di Apotek Puspa tidak hanya terbatas pada aspek harga, tetapi juga mencakup proses interaksi dan penyampaian informasi kepada konsumen, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam etika bisnis Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah dijelaskan dan dianalisis sebelumnya, agar pemahaman menjadi lebih singkat, tepat, dan terarah, kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah menerapkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam praktik pelayanan serta transaksi jual beli obat generik. Prinsip keadilan terlihat dari pemberian pelayanan yang sama kepada semua konsumen tanpa ada diskriminasi, serta upaya membantu konsumen dalam memilih obat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Prinsip kejujuran diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas dan terbuka mengenai harga, manfaat, cara penggunaan, dan efek samping obat sebelum proses transaksi dilakukan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pelayanan di Apotek Puspa tidak hanya memenuhi standar pelayanan kefarmasian dan perlindungan konsumen, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.
2. Penetapan harga dan mekanisme penjualan obat generik di Apotek Puspa telah sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam perspektif etika bisnis Islam. Kebijakan penetapan harga dilakukan dengan mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku serta penerapan margin keuntungan sebesar 15%, yang masih dalam

batas wajar dan tidak merugikan konsumen. Transparansi harga, kejelasan informasi produk, serta proses transaksi yang dilakukan secara sukarela menunjukkan bahwa praktik penjualan obat generik dilakukan secara adil, jujur, dan bertanggungjawab.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupannya ke lebih banyak apotek dan melibatkan informan yang beragam, seperti pemilik apotek dan apoteker, sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai penerapan etika bisnis Islam.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mencakup lebih banyak jenis obat generik dan menggunakan data harga yang lebih lengkap, termasuk harga beli serta margin keuntungan, sehingga analisis terhadap penerapan prinsip keadilan dan kejujuran dalam menetapkan harga obat generik dapat dilakukan dengan lebih dalam dan objektif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)." Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023 <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/778/>.
- Anti, Meri Khusnawati, Ima Frafika Sari, Marsha Falia Rifai, & Ravinza Husen Samudra. "Praktik Jual Beli di Destinasi Wisata: Sebuah Tinjauan Etika Bisnis Islam," *Jurnal Antologi Hukum*, 2, no. 2, (IAIN Ponorogo, 2022): 219. DOI: [10.21154/antologihukum.v2i2.1341](https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1341).
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, 2013. https://www.academia.edu/35464288/ETIKA_BISNIS_PERSPEKTIF_I_SLAM.
- Armin, Diah Rosidah. "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Obat Generik Di Apotek Rayhan Farma Kecamatan Pagotan Kecamatan Madiun." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/18394/1/Skripsi%20DIAH%20ARMIN%20ROSIDAH_210216039_Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20\(ethesis\).pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/18394/1/Skripsi%20DIAH%20ARMIN%20ROSIDAH_210216039_Hukum%20Ekonomi%20Syariah%20(ethesis).pdf).
- Azizah, Laili Nur, Erlin Ifadah, Yayu Nidaus Fithriyyah, Tasbihuk Anwar, Wilda Fauzia, Ayu Dewi Nastiti, Hafna Ilmi Muhalla, Ida Zuhroidah, Puteri Indah Dwipayanti, Ace Sudrajat, dan Helda Puspitasari. *Buku Ajar Farmakologis Keperawatan*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023. <http://respository.stikesrsadgs.ac.id>.
- Adussamad, Zuchri. "Metode Penelitian Kualitatif," Makassar: CV. Syakir Media Perss, 2021. 108. <https://share.google/xyyb4wZrWX0HhjuA3>.
- Alifah, Anjas Bakry. "Menuntut Ilmu sebagai Nikmat dan Ibadah yang Mulia." Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, 2024. <https://share.google/4Eo42cfyqbicWFoby>. 25 Oktober 2025. Pukul 19.13 WIB.
- Alif, Putra Kurniawan Akbar, Elvin Adria Saputri, Ayu Dwi Yulandari, Rini Puji Astuti. "Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Uin Khas Jember Tentang Edukasi Investasi Saham Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2 no. 3 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025): 40. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i3.872>.
- BPS Kabupaten Jember. "Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Desa, 2020." November 2, 2021,

<https://jemberkab.bps.go.id/statictable/2021/11/02/311/jumlah-fasilitas-kesehatan-menurut-desa-2020.html> 20 Mei 2024, 30 Mei 2024, pukul 15:37 WIB.

Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Surakarta: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta. 2009. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/520/1/5%20Binder%20Muamalah.pdf>.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. (n.d.). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 19 Agustus 2024. <https://gatrik.esdm.go.id>. 20 April 2024, Puku 23.50 WIB.

Kemkes Diktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2023. "Perbedaan Obat Generik dan Obat Paten," https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2868/perbedaan-obat-generik-dan-obat-paten, 13 November i 2024, pukul 20:40 WIB.

P2K STEKOM. "Kaliwates, Jember." Semarang jawa tengah, 2023. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kaliwates,_Jember. 25 Mei 2024. Pukul 21:26 WIB.

Eka, Azahra Putri., Dwi Septi Nuraeni, Lilis Renfiana. 2023. "Implementasi Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Melakukan Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Pagi 28 Purwoasri Metro Utara)." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1 no, 6 (IAIN Metro 2023): 264. <https://doi.org/10.61132/santri.v1i6.130>.

Fauzan. Nur Ika Mauliyah, Nurul Setianingrum, M.F Hidayatullah. "*Etika Bisnis dan Profesi*." Jakarta: Indigo Media, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/27569/1/Etika%20Bisnis%20%26%20Profesi%20-%20standar%20-%20Oke.pdf>.

Febri, Fidela Arisanti. "Analisis Minimalisasi Biaya Harga Obat Antidiabetes di Beberapa Apotek Kabupaten Malang (Studi dilakukan terhadap Obat Glibenklamid dan Metformin)." Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021. [https://repository.ub.ac.id/183890/1/-%20Fidela%20Febri%20Arisanti%20\(1\).pdf](https://repository.ub.ac.id/183890/1/-%20Fidela%20Febri%20Arisanti%20(1).pdf).

Firdaus, Adhy. Siti Pratiwi Husain. Djoko Soelistya. *Etika Bisnis Syariah*. Solok, Sumatera Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia. 2024. <https://eprints.umg.ac.id>.

Fadillah, Tiara., Sri Ramadhani, Rahmat Daim Harahap. "Etika Bisnis Islam: Praktik Jual Beli Obat Sirup Anak Pada Apotik Di Kecamatan Secanggang." *Manajemen Studies And Entrepreneurship Journal* 4 no. 5

- (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023): 5020.
<https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2192>.
- Harjadi, Dikdik., Dewi Fatmasari, *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep*. Kuningan: UNIKU Press, 2015.
<https://share.google/JSPyoS3tP8g08kTEp>.
- Haryoko, Sapto Bahatiar, Fajar Arwadi, Fajar Arwadi, and Bahartiar. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep Teknik, & Prosedur Analisis)*. Universitas Negeri Makassar: 2020.
<https://share.google/V4ABmXKqeVwUYXe0K>.
- Hasna. "12 Apotek Sekitar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember." 2024.
<https://palingmenarik.name/kesehatan/2024/03/apotek-sekitar-kecamatan-kaliwates-kabupaten-jember.html>. 30 Mei 2024, pukul 12:47 WIB.
- Hukomonline, Tim. "Kepatuhan Hukum dan Solusi Masa Kini untuk Memenuhinya." Jakarta Selatan: Regulatory Compliance System, 2022.
<https://rcs.hukumoline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>. 23 Mei 2024, pukul 19:12 WIB.
- Harahap, Isnaini, dan M. Ridwan. *The Handbook of Islamic Economics*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
<http://repository.uinsu.ac.id/16297/1/The%20handbook%20Of%20islamic%20economics%20ok.pdf>. 16 November 2024, pukul 18:49 WIB.
- Hartono, Rudi Maisarah, Pira Yulisman, Dan Recy Fitrya Murni. "Etika Bisnis Islami dalam Perspektif Fiqih Muamalah Antara Hukum, Moral, dan Spiritualitas," *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2, (UIN Imam Bonjol Padang 2025): 244.
<https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.995>.
- Huda, Nurul, Sofiah. "Kualitas Pelayanan Mesin Customer Service (CS) Digital Dalam Mengatasi Permasalahan Kartu ATM Nasabah Pada BCA KCP Besuki Situbondo." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2025): 200-201.
<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.94>.
- Hasanah, Rizkiyatul, Nazhifah Mildani Nuruddhuha, Arrum Maulidya, Ayyu Ainin Mustafidah. "Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember." *Jurnal Penelitian Nusantara*. 1, no. 3 (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2025): 677-678.
<https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.172>.

- Ika, Nur Mauliyah, "Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)," *Jurnal Ecoment Global* 3, no. 1 (Universitas Islam Blitar, 2018): 79 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=nur+ika+mauliyah&oq=Nur+#d=gs_qabs&t=1761496265184&u=%23p%3DDWL9kudS1cEJ.
- Irsan, Muhammad. "Analisis Komunikasi Apoteke Dalam Pelayanan Optimal Studi Kasus Di Apotek Shan Farma Merauke: Review Jurnal." *Jurnal Ilmia Penelitian Madira Cendikia* 3, no. 1 (Bandung: 2025): 4. <https://journal-mandiracendikia.com/jip-mc>.
- Ismail, Tamran., Ari Pernama Putra, Luh Putu Desy Puspaningrat, Muhammad Buchari SQ. "Perbandingan Kadar Disolusi Tablet Allopurinol Generik Berlogo Dan Generik Bermerek Yang Beredar Dikota Kupang Provinsi Ntt." *Jurnal Farmasi Kryonaut*. 2, no.2 (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng Program Studi Sarjana Farmasi 2023): 140. <https://doi.org/10.59969/jfk>.
- Jazil, Thuba, Nur Hendrasto. *Prinsip dan Etika Bisnis Syariah*. Bandung: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021. <https://kneks.go.id/storage/upload/1686216705-Prinsip%20&%20Etika%20Bisnis%20syariah.pdf>.
- Kamal, Muhammad Zubair. *Implementasi Etika Bisnis Islam*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, <https://share.google/GBvMjHACtuYZ20yYX>.
- KEMENKES, BKPK. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/1/2010," Jakarta Selatan. 2024. <https://regulasi.bkpk.kemkes.go.id/detail/43ed7849-8f93-43e0-8186-06eacb9aff4b/yg>. 22 November 2024, pukul 04.17 WIB.
- Kemenag, Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>. 18 Mei 2024, pukul 20:07 WIB.
- Mukharomah, Mifnatul, Mei Santi. "Etika Pelayanan *Usaha Food Court Perspektif* Ekonomi Islam (Studi Pada Queen Resto Kelurahan Bago Tulungagung)." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 08, no. 01. (Sekolah Tinggi Agama Islam Tulungagung 2021): 51. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/Eksyar>. 21 oktober 2025. pukul 03:10 WIB.
- Munawaroh, Nadhatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Saren Untuk Obat di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18571/>.

- Malahayatie. *Konsep Etika Bisnis Islam (Suatu Pengantar)*. Aceh: Cv. Sefa Bumi Persada, 2022.
<https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/160>.
- Manalu, Mutiara., Nazwa Alpuja Elsa, & Gymnastiar Febriani, "Etika Bisnis Islam," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 4, no. 1 (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2025): 6-7, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4695>.
- Masruroh, Nikmatul, Suprianik, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores*, 13, no.2 (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: 2023): 358. <http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/analisi>.
- Nurul, Siti Huda, Nandang Ihwanuddin, "Etika Bisnis dalam Tinjauan Al-Qu'an dan Hadits." *journal of Islamic studies review*. 02 no.1 (Universitas Islam Bandung, 2022): 67-70. <https://share.google/rbIk3D4kcsbTL28WX>.
- Nur, Siti Fatoni. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Nur, Laili Cholidah. "Pengetahuan, Sikap dan Persepsi Masyarakat dan Tenaga Kesehatan Terhadap Obat Generik dengan Metode Systematic Literature Review." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64234/1/Laili%20Nur%20Cholidah%20-%20FIKES.pdf>. 29 Mei 2024, pukul 00: 58 WIB.
- Nursalim, Alvin 2022. "Beda Obat Generik dan Obat Paten." <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/beda-obat-generik-dan-obat-paten>. 23 mei 2024, pukul 20: 05 WIB.
- Novianing, Sandra Tyastuti. "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk di Gapoktan Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021. <https://theses.iainponorogo.ac.id/13776/1/sandra%20upload%20e%20theses.pdf>.
- Nurjannah, Ita Rukmanasari, Prades Ariato Silondae, Rahmawati Muin, Abdul Wahid Haddade. 2024. "Praktik Bisnis yang Dilarang dalam Islam: Perspektif Etika dan Hukum." *Buhuts e- Jurnal* 20, no. 1 (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2024): 55. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4852>.
- Nur, Solaeman Rahman. "15 Review Apotek Terbaik di Kab. Jember." *Ulastempat*, November, 12, 2022, <https://www.ulastempat.com/15->

[review-apotek-terbaik-di-kab-jember15-apotek-rekomendasi-di-kab-jember/](#). 20 Mei 2024. Pukul 12: 47 WIB.

- Oktaviani, Anisa., Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti. “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Parfum Refill (Isi Ulang) di Kecamatan Bandung Kulon.” *Sharia Economic Law* 3, no. 1 (universitas islam Bandung, 2023): 62. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i1.6731>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan No 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi HET pada Obat*. <https://iajatim.id>.
- Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. *Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia*. IAI, Jakarta: 2020. <https://share.google/zp5q8aVtemKCCxN6G>. 26 Oktober 2025. pukul 03.35 WIB.
- Ras, An Try Astuti. *Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontemporer)*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU%20ETIKA%20BISNIS%20ISLAM%20ANRAS%20neww.pdf>.
- Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, M. Amin Qodri. 2024. “*Etika Bisnis Islam*.” Bandung: Widina Media Utama, 14. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/569686/etika-bisnis-islam>.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rianti. “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Marketplace Lazada.” *Journal Of Economics And Business Research* 1, no. 1 (IAIN Ponorogo, 2021): 13. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2021&q=etika+bisnis+Islam++terhadap+praktek+jual+beli+&btnG=#d=gs_q_abs&t=1761013319991&u=%23p%3DwoHn66W5PbUJ, 21 Oktober 2025. Pukul 06:45 WIB.
- Salim dan Syahrur “*Metodologi Penelitian Kualitatif*.” Bandung: Citapuska Media, 2012. 142-143. UIN Sumatera Utara Medan <https://share.google/Q5sYCsMX20rlv2tNq>. 20 November 2024. Pukul 23.55 WIB.
- Sudaryono. 2017. “*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mix Method*” (Depok: Raja Grafindo Persada), 520.
- Sugiyono. 2022. “*Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif, dan R &B*” (Bandung, Alfabeta), 224.

- Sugiyono, 2013, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*” (Bandung, Alfabeta). <https://share.google/rv4J3nNknVg4Uaech>, 13 Mei 2024. Pukul 02.34 WIB.
- Safitri, Adek Nasution, M. Yarham. “Peran Penting Etika Bisnis Terhadap Pendapatan dan Pengembangan UMKM.” *Journal Of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (Medan: Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad, 2023): <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/welfare/article/download/16339/7061>. 13 Mei 2024, pukul 19:03 WIB.
- Septiani, M.Faud Hadziq. “Implementasi Etika Bisnis Islam pada sistem Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (Universitas Terbuka 2023): 4065. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>.
- Suminingsih, *Etika Bisnis Islam*. Pekalongan, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM - Anggota IKAPI), 2020. <https://share.google/oX23zG8qy5TfPM5dL>.
- Toriq, M Nur Madiansyah. *Etika Bisnis Islam Konsep dan Praktek*. Yogyakarta: CV Cakrawala Media Pustaka, 2021. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/57520/>.
- Usnan, *Etika Bisnis Islam: Keindahan Ajaran Islam dalam Berbisnis*. Jakarta: Gerbang Media Aksara, 2021. <https://share.google/U3XXxWDEBwCvIgILL>.
- Wati, Ambar, Arman Paramansyah, Dessy Damayanthi. “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: Studi Kasus Pasar Tradisional Pendopo Empat Lawang, Sumatera Selatan.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, 2019). <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/elmal/article/download/344/281/>.
- Wati, Destiya., Suyud Arif, Abristadevi. “Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humairah Shop,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis* 5 no. 1 Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2022): 148. DOI: [1047467/elmal.v5i1.654](https://doi.org/10.1047467/elmal.v5i1.654).
- Widiastuti, Nunik. “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Tebasan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2021&q=etika+bisnis+Islam++terhadap+praktek+jual+beli+&btnG=#d=gs_q_abs&t=1761013648638&u=%23p%3DHyolQ1zFv-wJ.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Penerapan Prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Perspektif Etika Bisnis Islam.	Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli obat generik di Apotek.	1) Prinsip keadilan 2) Prinsip kejujuran	1) Pelayanan yang sama kepada seluruh konsumen 2) Tidak ada paksaan 3) Informasi obat jelas 4) Keterbukaan harga 5) Harga obat berlaku sama bagi semua konsumen.	Informan: 1) Pihak Internal Apotek Puspa 2) konsumen di Apotek Puspa	1) Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 2) Lokasi penelitian di kecamatan kaliwates kabupaten jember. 3) Subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling 4) Metode pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara, dan dokumentasi. 5) Analisis data melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. 6) Validitas data menggunakan triangulasi sumber.	1) Bagaimana penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam praktik jual beli obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates? 2) Bagaimana penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam penetapan harga obat generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates?

LAMPIRAN 1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERMATERAI DAN
DITANDATANGANI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Laili Hilalia

Nim : 204105020157

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul :

**”TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
OBAT GENERIK DI APOTEK PUSPA KECAMATAN KALIWATES
KABUPATEN JEMBER”**

Secara keseluruhan adalah hasil kejaian atau karya sendiri, kecuali pada bagian
yang dirujuk sumbernya. J E M B E R

Jember, Senin 13 November 2025
Hormat Saya,

NURUL LAILI HILALIA
NIM. 204105020157

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Pedoman Observasi
1. Bagaimana penerapan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam praktik jual beli obat generik di Apotek Puspa
 2. Bagaimana proses transaksi dan pelayanan terhadap konsumen dilakukan di Apotek.
- B. Pedoman Wawancara
1. Karyawan Apotek Puspa
 - a) Apakah setiap transaksi penjualan obat generik dilakukan sesuai dengan prosedur apotek?
 - b) Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada konsumen, khususnya saat membeli obat generik?
 - c) Apakah petugas memberikan penjelasan mengenai harga, dosis, dan aturan pakai obat kepada konsumen?
 - d) Bagaimana kebijakan penetapan harga obat generik di Apotek Puspa?
 - e) Apakah margin keuntungan untuk obat generik ditetapkan secara wajar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
 - f) Apakah seluruh konsumen mendapatkan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan status sosial atau ekonomi?
 - g) Bagaimana upaya apotek untuk menjaga kejujuran dalam pelayanan dan penetapan harga
 - h) Bagaimana apotek menyikapi konsumen yang tidak mampu membeli obat dengan harga tersebut?
 - i) Apakah harga selalu sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)?
 - j) Apakah apotek menyediakan informasi harga dan jenis obat secara terbuka?
 - k) Bagaimana anda menunjukkan keramahan dalam melayani konsumen yang membeli obat generik?
 - l) Apakah anda menjelaskan obat generik cara kerja efek samping obat secara jelas?
 - m) Jika konsumen keberatan dengan harga, apakah Anda menawarkan alternatif obat lain?
 2. Konsumen Apotek Puspa
 - a) Apakah anda sering membeli obat generik di apotek puspa?
 - b) Apakah anda merasa harga dijelaskan dengan jelas?
 - c) Apakah karyawan atau apoteker menjelaskan kandungan dan cara obat?
 - d) Bagaimana menurut anda sikap karyawan apotek dalam melayani anda?
 - e) Apakah anda merasa diperlakukan dengan adil dan jujur?

- f) Pernahkah anda merasa dirugikan atau tidak puas dalam pembelian obat di apotek puspa?
- g) Apakah anda merasa puas dengan pelayanan saat membeli obat generik?
- h) Menurut anda, apakah apotek memberikan pelayanan yang ramah dan membantu saat anda membeli obat generik?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 3

JURNAL KEGIATAN LAPANGAN

JURNAL KEGIATAN LAPANGAN

No	Tanggal	Kegiatan	Nama Narasumber	Paraf
1	30 Agustus 2025	Observasi apotek puspa dan koordinasi izin penelitian	Fildatul hasanah
2	05 Agustus 2025	Menyerahkan surat izin penelitian apotek	Sri Setiarti
3	11-13 Agustus 2025	Wawancara dengan konsumen dan karyawan kasir apotek puspa	Konsumen: ayu, matnul, halimah, dan yuni. Karyawan: sri setiarti
4	13-17 Agustus 2025	Wawancara dengan konsumen dan asisten apotek puspa	Konsumen: rani, ajeng, wulan, dan agus. Karyawan: Fildatul hasanah
5	20 Agustus 2025	Pengambilan surat selesai penelitian	Fildatul hasanah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 13 November 2025

Peneliti

Nurul Laili Hilalia
204105020157

LAMPIRAN 4

SURAT IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : 1929 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/08/2025 11 Agustus 2025
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Apotek Puspa

Jl. Basuki Rahmat No.217, Muktisari, Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi, maka dengan ini saya :

Nama : Nurul Laili Hilalia
 NIM : 204105020157
 Semester : XI (Sebelas)
 Prodi : Ekonomi Syariah

Mohon izin untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawat Islami Rahayu

LAMPIRAN 5

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: -

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharti, SST, S.Pd., M.Si.
 Jabatan : Pemilik Apotek Puspa
 Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.217, Muktisari, Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nurul Laili Hilalia
 NIM : 204105020157
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dilaksanakan sejak tanggal 11 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2025.

Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Agustus 2025

Hormat kami,
 Pemilik Apotek Puspa

Suharti, SST, S.Pd.,M.Si.

LAMPIRAN 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Taggal	Jenis Kegiatan
1	11 November 2024	Penyusunan Proposal Penelitian
2	20 Mei 2025	Acc Proposal dan Pendaftaran Ujian Seminar Proposal
3	11 Juni 2025	Seminar Proposal
4	30 Agustus 2025	Observasi Apotek Puspa
5	05 Agustus 2025	Menyerahkan Surat Izin Penelitian Apotek
6	13 Agustus 2025	Wawancara Dengan Narasumber
7	20 Agustus 2025	Pengambilan Surat Selesai Penelitian
8	25 Agustus 2025	Analisis Data Penelitian
9	22 September 2025	Penyusunan Skripsi

Jember, 13 November 2025
Peneliti

Nurul Laili Hilalia
204105020157

LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Karyawan Kasir Apotek Puspita

Wawancara dengan Asisten Apoteker Apotek Puspita

Wawancara dengan Asisten Apoteker Apotek Puspita

Mengamati interaksi karyawan Apotek dengan konsumen

Wawancara dengan konsumen Apotek Puspa

Wawancara dengan konsumen Apotek puspa

Dokumentasi Keadaan Apotek Puspa

Dokumentasi Keadaan Apotek Puspa

LAMPIRAN 8

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Laili Hilalia
 NIM : 204105020157
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Jual Beli Obat Generik di Apotek Puspa Kecamatan Kaliwates kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 17 November 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Mariyah Ulfah, MEI
 NIP.197709142005012004

LAMPIRAN 9

MENSITASI JURNAL DOSEN

1. Nikmatul Masruroh, Suprianik, *"Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Desa Dalam Perspektif Maqashid Syariah,"* Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Flores, Vol. 13 No. 02 Tahun 2023, Hal. 348- 368.
2. Rizkiyatul Hasanah, Nazhifah Mildani Nuruddhuha, Arrum Maulidya, Ayyu Ainin Mustafidah, *"Manajemen Sumber Daya Insani Dalam Mendukung Peningkatan Pelayanan Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, "* Jurnal Penelitian Nusantara, Vol 1 No. 03 Maret 2025, Hal. 676-682.
3. Nur Ika Mauliyah, *"Strategi Penentuan Harga Jual Sayuran Pada Pedagang Pasar Tradisional (Studi Fenomenologi Pedagang Sayur Di Blitar)."* Jurnal Ekoment Global, vol. 3 no. 1 Edisi Februari 2018, Hal. 76-82.
4. Putra Alif Kurniawan Akbar, Elvin Adria Saputri, Ayu Dwi Yulandari, Rini Puji Astuti, *"Persepsi Mahasiswa Perbankan Syariah Uin Khas Jember Tentang Edukasi Investasi Saham Syariah,"* Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol.2, No.3 Mei 2025, Hal. 37-43.
5. Nurul Huda, Sofiah, *"Kualitas Pelayanan Mesin Customer Service (CS) Digital Dalam Mengatasi Permasalahan Kartu ATM Nasabah Pada BCA KCP Besuki Situbondo,"* Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 1, No. 3 Maret 2025, Hal. 199-204.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 10

SURAT KETERANGAN SELESAI BIMBINGAN

<p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febl@uinkhas.ac.id Website: http://febl.uinkhas.ac.id</p>
<u>SURAT KETERANGAN</u>			
Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :			
Nama	: Nurul Laili Hilalia		
NIM	: 204105020157		
Semester	: XI (Sebelas)		
Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.			
Jember, 24 November 2025 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,
Sofiah, M.E. NIP. 199105152019032005 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER			
digilib.uinkhas.ac.id	digilib.uinkhas.ac.id	digilib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN 11

BIODATA PENULIS

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Nurul Laili Hilalia
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 23 Juli 2002
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun Barat Embung, RT 002 RW 001,
 Desa Brakas, Kecamatan Raas,
 Kabupaten Sumenep, 69485.
 NIM : 204105020157
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
 No.HP : 085730824516
 Email : nurullely23@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 1 Brakas Raas
 Madrasah : Madrasah Diniyah Kasyfudduja
 SMP : SMPN 1 Raas
 SMA : SMA Islam Al-Fanisa
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
 Achmad Siddiq Jember